



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 195 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029**



DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR **195** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Sekda Nomor E-0023 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

4. Instruksi Sekda Nomor E-0023 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29 September 2025**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA,



HISUDUNGAN A. SIDABALOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Jakarta, 29 September 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,

Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si
NIP. 197308122006041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas	13
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Pangan.	
.....	14
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelautan	15
2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan	16
2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	17
2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertanian.....	17
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi	19
2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara.....	21
2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi	23
2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis	25
2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional....	25
2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pelaksana	25
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	28
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	31
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	34
2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran	44
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	53
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan ..	
.....	57

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	58
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat	60
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	62
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	62
2.2.2 Isu Strategis	83
2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	84
2.2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)....	88
2.2.2.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	93
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	98
3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH ..	98
3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH	104
3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	119
3.4 PENYUSUNAN POHON KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	124
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	127
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH	127
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	270
BAB V PENUTUP.....	275

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Golongan.....	28
Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan	30
Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana.....	32
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	36
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta	46
Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan	53
Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah	58
Tabel 2.8 Dukungan BUMD	59
Tabel 2.9 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah.....	60
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	62
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	85
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW	88
Tabel 2.13 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis	95
Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	101
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	104
Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran 1	105
Tabel 3.4 Perumusan Strategi Sasaran 2	107
Tabel 3.5 Perumusan Strategi Sasaran 3	109
Tabel 3.6 Perumusan Strategi Sasaran 4	114
Tabel 3.7 Penentuan Strategi	117
Tabel 3.8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	120
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	128
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	173
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	258
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	270
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta.....	27
Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang berlandaskan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran negara Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);
17. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun maksud disusunnya Renstra Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;
- f. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan;
- g. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung

pencapaian visi dan misi unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;

- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- d. Memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematikan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan, dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan
 - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tangung jawab Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan
- 3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah, dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP;
- b) pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
- c) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP;
- d) perumusan, pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- f) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- g) pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h) pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas KPKP;
- i) pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- j) perlindungan sumber daya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan kesehatan hewan;
- k) pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;
- l) pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- m) fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n) pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o) penyelenggaraan standardisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- p) konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;
- q) pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- r) pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t) pengelolaan kesekretariatan Dinas KPKP;
- u) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v) pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- w) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
- x) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas KPKP dipimpin oleh Sekretaris Dinas KPKP. Sekretaris Dinas KPKP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Sekretariat Dinas KPKP mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di

lingkungan Dinas KPKP. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas KPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP;
- b) pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas KPKP;
- d) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas KPKP;
- e) pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- f) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas KPKP;
- g) pengelolaan data dan sistem informasi Dinas KPKP;
- h) penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas KPKP; dan
- i) pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas KPKP.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, serta keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- c) pelaksanaan kegiatan distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan dan analisis konsumsi pangan;
- d) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan ketahanan pangan;
- e) pelaksanaan analisis Pola Pangan Harapan, Neraca Bahan Makanan dan distribusi pangan; dan
- f) penyusunan materi informasi distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan dan analisis konsumsi pangan.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelautan

Bidang Kelautan dipimpin oleh Kepala Bidang Kelautan. Kepala Bidang Kelautan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Bidang Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang kelautan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan;
- c) penyusunan rencana dan pengaturan tata ruang perairan pesisir dan perizinan pemanfaatan ruang laut;

- d) pendayagunaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- e) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pendayagunaan dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- f) fasilitasi pengembangan ekonomi kelautan masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g) mitigasi bencana di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- h) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- i) pelaksanaan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan dan perikanan;
- j) pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- k) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- l) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kelautan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
- m) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
- n) penyiapan data statistik dan informasi Bidang Kelautan.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan. Kepala Bidang Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Bidang Perikanan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,

pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- d) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- e) pemantauan peredaran hasil perikanan lokal, ekspor dan impor;
- f) pembinaan, pelayanan dan pengembangan kegiatan perikanan dan kelompok binaan yang menjadi lingkup tugas Dinas KPKP;
- g) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup perikanan; dan
- h) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Bidang Perikanan.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanian. Kepala Bidang Pertanian berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPBP. Bidang Pertanian mempunyai tugas dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian perkotaan dan penyuluhan, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta pengendalian mutu dan agribisnis. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang pertanian;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- c) pelaksanaan analisa data potensi dan statistik pertanian sebagai bahan informasi penentu kebijakan;
- d) penyusunan bahan pengawasan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
- e) pengkajian kebutuhan penerapan teknologi baru (inisiasi) dibidang budidaya pemasaran, pascapanen dan olahan, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
- f) pengawasan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan penataan kawasan agro/agrowisata;
- g) mengordinasikan, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pertanian perkotaan dan penyuluhan, pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian, pengembangan perbenihan pertanian, penghijauan produktif dan pengembangan Ruang terbuka hijau pertanian, pengolahan, pemasaran, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
- h) pelaksanaan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pupuk pestisida dan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i) pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi lintas sektoral tingkat Provinsi;
- j) pelaksanaan koordinasi kegiatan pameran, promosi, display dan publikasi hasil pertanian;

- k) pelaksanaan pengendalian, supervisi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pertanian;
- l) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan investasi serta permodalan;
- m) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh Suku Dinas KPKP Kota Administrasi, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup pertanian; dan
- n) pengembangan kewirausahaan dan kemitraan hasil pertanian.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi

Suku Dinas KPKP Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kota Administrasi. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi;
- b) pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;

- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- d) pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- e) pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharaannya;
- f) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang terbuka hijau pertanian;
- g) pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h) pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- i) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- j) pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k) pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
- l) supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
- m) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
- n) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;

- o) pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kota Administrasi;
- p) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi; dan
- q) penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi.

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara

Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara berkoordinasi dengan Walikota. Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas membantu Dinas KPKP dalam pelaksanaan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b) pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- c) pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;

- d) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e) pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f) pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharaannya;
- g) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pertanian;
- h) pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- i) pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- j) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- k) pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l) pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
- m) supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan;
- n) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;

- o) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
- p) pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara;
- q) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- r) penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Utara.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi

Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi. Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas KPKP. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Bupati. Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;
- b) pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- c) pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan,

- perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
- d) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, kesehatan hewan dan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - e) pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - f) pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharaannya;
 - g) pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau pertanian pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - h) pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - i) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - j) pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k) pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
 - l) supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi KPKP Kecamatan;
 - m) pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;

- n) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
- o) pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi;
- p) penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi; dan
- q) penyiapan bahan laporan Dinas KPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi.

2.1.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas KPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Dalam hal Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, berlaku ketentuan yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana bisnis anggaran;
- b) pelaksanaan rencana bisnis anggaran; dan
- c) pemantauan dan evaluasi rencana bisnis anggaran.

2.1.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional pada PD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing, serta tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

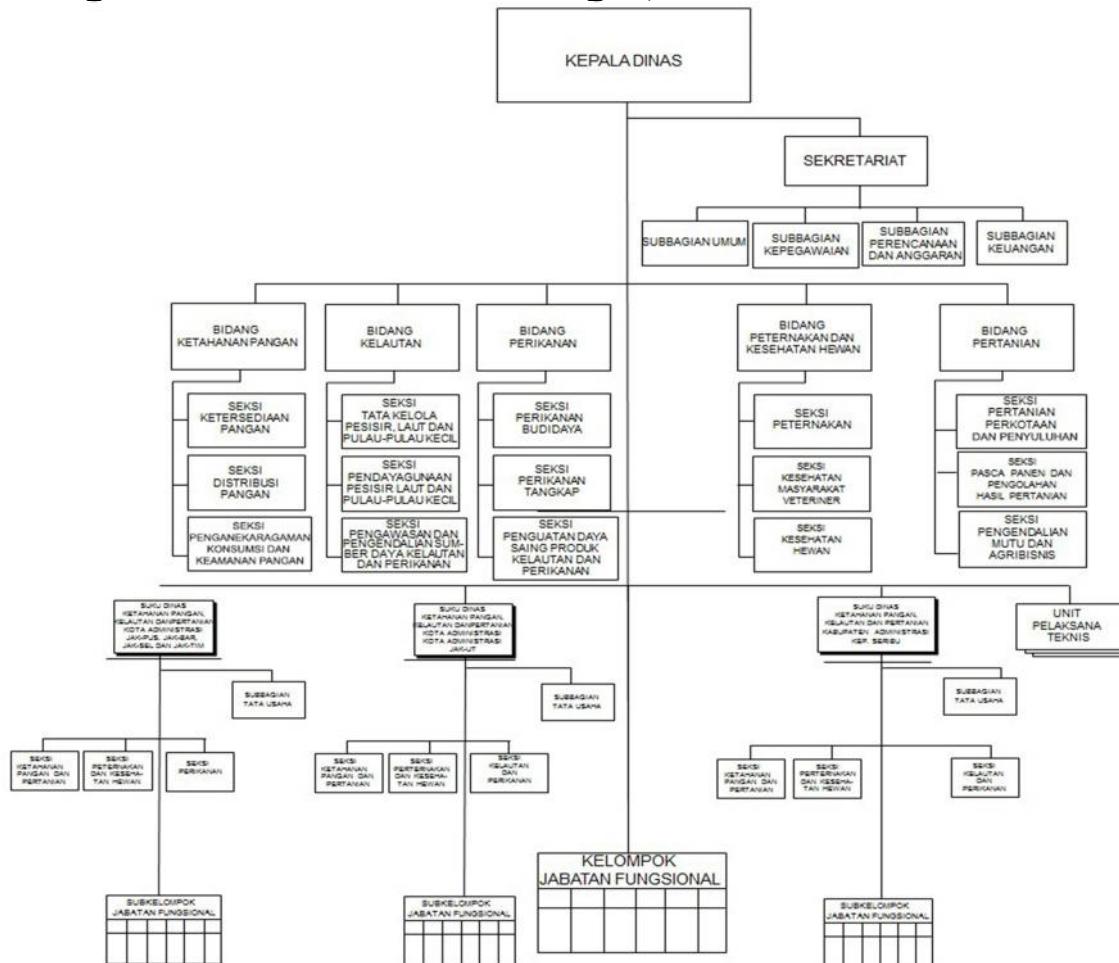
2.1.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana pada PD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Kelautan, Bidang Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota/Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional. Untuk bagan struktur organisasinya adalah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

Adapun sumber daya manusia ASN yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebanyak 320 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Juru (I/c)	1
2	Pengatur Muda (II/a)	7
3	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1
4	Pengatur (II/c)	54
5	Pengatur Tk.I (II/d)	24
6	Penata Muda (III/a)	14
7	Penata Muda Tk.I (III/b)	63
8	Penata (III/c)	39
9	Penata Tk.I (III/d)	59
10	Pembina (IV/a)	33
11	Pembina Tk.I (IV/b)	10
12	Pembina Madya (IV/d)	1
13	IX	13
14	X	1
Jumlah		320

Sumber: Subkel Kepegawaian DKPKP, Agustus 2025

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, tercatat sebanyak 306 orang dan PPPK sebanyak 14 orang yang tersebar dalam berbagai golongan kepangkatan. Sebagian besar ASN berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 175 orang atau sekitar 54,68% dari total keseluruhan. Di antara golongan ini, jumlah terbesar terdapat pada Golongan III/B sebanyak 63 orang, diikuti oleh III/D sebanyak 59 orang, dan III/C sebanyak 39 orang, yang mencerminkan dominasi pegawai pada jenjang fungsional dan struktural menengah, umumnya dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1). Selanjutnya, terdapat pegawai pada Golongan IV sebanyak 44 orang atau sekitar 13,75%, dengan distribusi tertinggi pada Golongan IV/A sebanyak 33 orang, yang umumnya mencerminkan jabatan administrasi senior atau fungsional ahli madya. Sementara itu, Golongan II tercatat sebanyak 86 orang atau sekitar 28,75%, dengan komposisi tertinggi pada Golongan II/C sebanyak 54 orang dan II/D sebanyak 24 orang, menunjukkan masih adanya tenaga teknis pendukung yang berasal dari jenjang pendidikan menengah atau diploma. Sementara untuk PPPK ada 13 orang dengan golongn IX dan 1 orang Golongn X.

Hanya terdapat 1 orang pada Golongan I (I/C) dan Golongan II/B, yang mengindikasikan bahwa struktur kepegawaian cenderung mengalami peningkatan pangkat dan telah beranjak dari golongan-golongan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi SDM Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian telah relatif matang secara kepangkatan, dengan dominasi pegawai yang siap menduduki peran strategis di lapangan maupun manajerial. Komposisi ini secara umum mencerminkan bahwa dinas telah memiliki struktur SDM yang relatif kuat di tingkat menengah dan atas, yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional, serta dalam

pengembangan inovasi program yang memerlukan kompetensi profesional. Namun demikian, perlu tetap dilakukan penguatan kapasitas teknis dan regenerasi SDM agar kesinambungan pelayanan publik dapat terus terjaga secara optimal.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebanyak 320 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2	40
3	S-1	120
4	D-IV	10
5	D-III	71
6	D-II	1
7	D-I	0
8	SMA	74
9	SMP	2
10	SD	1
Jumlah		320

Sumber: Subkel Kepgawaiian DKPKP, Agustus 2025

Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 320 orang ASN dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Komposisi terbesar berasal dari lulusan S-1 sebanyak 120 orang, atau sekitar 37,5% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki kompetensi pendidikan tinggi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan program strategis, perencanaan, dan pengelolaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian. Selanjutnya, sebanyak 40 orang atau sekitar 12,5% merupakan lulusan S- 2 dan 1 orang dengan S-3, mencerminkan keberadaan tenaga profesional dan akademisi tingkat lanjut di lingkungan dinas, yang berpotensi memperkuat perumusan

kebijakan, inovasi program, dan pelatihan internal. Sementara itu, jenjang pendidikan menengah atas (SMA) masih cukup signifikan dengan jumlah 74 orang (23,13%), yang umumnya mendukung pelaksanaan teknis administratif dan operasional di lapangan.

Untuk jenjang pendidikan vokasi, tercatat lulusan D-III sebanyak 71 orang, D-IV sebanyak 10 orang, dan D-II sebanyak 1 orang. Kelompok ini memiliki peran penting dalam mendukung tugas teknis, terutama dalam bidang penyuluhan, pengolahan, dan pelayanan publik sektor pangan dan pertanian. Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar, terdapat 1 orang lulusan SD dan 2 orang lulusan SMP, yang kemungkinan besar telah lama mengabdi sebelum regulasi pendidikan minimal diterapkan secara ketat. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa struktur pendidikan pegawai telah cukup kuat dengan dominasi lulusan sarjana dan pascasarjana, namun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM, terutama melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan agar seluruh pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru. Komposisi pendidikan ini juga memberikan gambaran bahwa dinas memiliki potensi besar untuk mengembangkan program-program yang berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, serta pelayanan prima kepada masyarakat.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Kebun Bibit	Laboratorium
1	Kebun Bibit Ragunan	Laboratorium Perikanan Pluit
2	Kebun Bibit Ciganjur	Laboratorium Pertanian Cibubur
3	Kebun Bibit Cibubur	Laboratorium Peternakan Bambu Apus
4	Kebun Bibit Wisata Agro Cibubur	
5	Kebun Bibit Agrowisata Cilangkap	
6	Kebun Bibit Condet	
7	Kebun Bibit Kelapa Dua Wetan	
8	Kebun Bibit Lebak Bulus	
9	Kebun Bibit Ujung Menteng	
10	Kebun Bibit Sukapura	
11	Kebun Bibit Kamal Muara	
12	Kebun Bibit Cengkareng	
13	Cagar Buah Condet	
14	Kebun Bibit Sawah Abadi	

No	Balai Benih Ikan (BBI)	Pelabuhan Perikanan	Tempat Pendaratan Ikan
1	Balai Benih Ikan Ciganjur	Pelabuhan Muara Angke	TPI Muara Angke
2	Balai Benih Ikan Kalideres	Pelabuhan Cilincing	TPI Cilincing
3	Balai Benih Ikan Ujung Menteng	Pelabuhan Kalibaru	TPI Kalibaru
4	Balai Benih Ikan Ciracas	Pelabuhan Kamal Muara	TPI Kamal Muara
5	Balai Benih Ikan Laut Pulau Tidung	Pelabuhan Pulau Pramuka	TPI Pulau Pramuka

No	Rumah Potong Hewan
1	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Petukangan Utara
2	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Lokbin Pasar Minggu
3	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Lele
4	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Terate
5	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting
6	Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rorotan

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2024

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki beragam sarana dan prasarana strategis yang tersebar di berbagai wilayah, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program-program teknis dan pelayanan publik. Fasilitas tersebut terdiri dari 14 kebun bibit, beberapa laboratorium pendukung, serta balai benih ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan. Sebanyak 14 kebun bibit dimiliki Dinas KPKP, antara lain Kebun Bibit Ragunan, Ciganjur, Cibubur, Condet, dan Kelapa Dua Wetan. Beberapa kebun bibit ini telah dilengkapi dengan laboratorium penunjang, seperti Laboratorium Perikanan Pluit, Laboratorium Pertanian Cibubur, dan Laboratorium Peternakan Bambu Apus. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara pengembangan bibit dengan kegiatan penelitian dan uji mutu yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan ketahanan bibit tanaman maupun ternak yang dikembangkan.

Selain itu, kebun bibit juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan konservasi, seperti Kebun Bibit Wisata Agro Cibubur dan Agrowisata Cilangkap, yang mendukung kegiatan pertanian perkotaan, pelestarian varietas lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Di sektor perikanan, Dinas KPKP mengelola 5 Balai

Benih Ikan (BBI), yaitu BBI Ciganjur, Kalideres, Ujung Menteng, Ciracas, dan Pulau Tidung.

Selain itu berdasarkan data pada tabel, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki enam Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Keenam RPHU tersebut antara lain RPHU Petukangan Utara, RPHU Lokbin Pasar Minggu, RPHU Rawa Lele, RPHU Rawa Terate, RPHU Rawa Kepiting, dan RPHU Rorotan. Keberadaan fasilitas ini berfungsi sebagai sarana pemotongan unggas yang higienis dan terkontrol, guna memastikan ketersediaan produk unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Selain itu, distribusi RPHU di berbagai wilayah Jakarta juga bertujuan untuk mendukung pemerataan pelayanan, memudahkan akses masyarakat maupun pelaku usaha, serta memperkuat sistem ketahanan pangan di ibu kota.

Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana ini menunjukkan bahwa DKPKP memiliki modal infrastruktur yang cukup kuat dan fungsional dalam mendukung ketahanan pangan, pertanian urban, serta pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Namun demikian, untuk memaksimalkan pemanfaatannya, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas operasional, pemeliharaan fasilitas secara berkala, dan optimalisasi fungsi laboratorium sebagai pusat inovasi dan peningkatan mutu hasil produksi. Hal ini penting agar sarana yang ada tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak produktivitas dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, maka kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Ketahanan Pangan				67, 43	70	78, 89	80	82, 22	N/A	78,8 9	80, 23	82, 22	85,1 3	N/ A	112 ,70 %	101 ,70 %	102 ,78 %	111, 79%
2	Persentase Ketersediaan Pangan				100					100					100 ,00 %				
3	Neraca Bahan Makanan					100	100				100	100				100 ,00 %	100 ,00 %		
4	Skor Pola Pangan Harapan				83	84	85	86, 3	92, 7	88,2	86,3	N/A	92, 7	91,3 1	106 ,27 %	102 ,74 %	N/ A	107 ,42 %	98,5 0%
5	Prevalensi Ketidakcukupan						2,4	2,4					2,5 7	3,53				107 ,08 %	152, 92%

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsumsi Pangan/ Prevalence Of Undernourishment (Pou)																			
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel				91	91				93,02	93,94				102,22%	103,23%				
7	Indeks Kesehatan Laut						65	68,77				68,77	69,65				101,28%	101,28%		

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	di Wilayah Kewenangan Provinsi																		
8	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi				143,2	144,2	145,2	146,2	147,2	143,687	196,02	213,82	255,3	272,27	100,34%	135,94%	147,26%	174,6%	184,9%
9	Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang							36,56	36,57					36,56	36,58			100,00%	100,03%

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial Dalam Kondisi Sedang dan Baik																		
10	Jumlah Luas Kawasan yang Dikelola untuk Koservasi dan Rehabilitasi				1,3	1	1			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		
11	Persentase Kualitas Pelaksanaan				100	91	91			89,66	93,02	93,94			89,66%	102,22%	103,23%		

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Anggaran																		
12	Jumlah Produksi Perikanan							139	211				211	219				151,54%	103,73%
13	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian							320	329	,34			119,44	204,74				104,98%	105,96%
14	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura							22,5	25				23,62	26,49				110,44%	101,84%
15	Persentase Peningk							2,5	24,9				22,4	27,52				896,00%	110,52%

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	atan Produksi Perternak an																		

Sumber:..

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat keberhasilan dalam mencapai sebagian besar target pelayanan, meskipun masih ditemukan kesenjangan pada beberapa indikator lainnya. Pelayanan yang telah mencapai atau bahkan melampaui target antara lain terdapat pada Indeks Ketahanan Pangan yang pada tahun 2024 mencapai 85,13 atau 111,79% dari target, serta Skor Pola Pangan Harapan yang juga menunjukkan hasil memuaskan, yaitu mencapai 91,31 pada tahun 2024 (98,50% dari target). Sektor produksi perikanan, pertanian, hortikultura, dan peternakan mengalami peningkatan signifikan. Misalnya, produksi perikanan pada tahun 2023 mencapai 151,54% dari target, sementara produksi peternakan melonjak tajam hingga 896% dari target pada tahun yang sama. Selain itu, indikator tata kelola keuangan daerah juga menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian lebih dari 100% pada tahun 2021 dan 2022. Keberhasilan ini umumnya didukung oleh efektivitas program intervensi, ketersediaan infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan dukungan kebijakan yang memadai.

Meskipun secara umum capaian indikator menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih guna meminimalkan kesenjangan dalam pelayanan. Salah satu indikator yang menunjukkan deviasi dari target adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU). Data menunjukkan bahwa PoU mengalami peningkatan, yakni dari 2,57 pada tahun 2023 menjadi 3,53 pada tahun 2024, melampaui batas target yang ditetapkan sebesar 2,4. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya kerentanan konsumsi pangan di masyarakat, yang perlu segera direspon melalui intervensi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah

strategis untuk meminimalkan ketimpangan konsumsi, seperti penguatan program ketahanan pangan, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, serta optimalisasi distribusi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan ini, diharapkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi dapat ditekan secara bertahap, sehingga pelayanan publik semakin inklusif dan merata. Beberapa indikator seperti Persentase Ketersediaan Pangan, Neraca Bahan Makanan, dan Cadangan Pangan belum menampilkan data realisasi, menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan logistik dan pelaporan data. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020 juga belum mencapai target, yaitu hanya 89,66% dari target 100%.

Permasalahan-permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya validasi dan pelaporan data, tantangan eksternal seperti perubahan iklim dan pandemi, terbatasnya akses distribusi pangan ke wilayah rentan, serta hambatan dalam regulasi dan perizinan lintas daerah. Meski demikian, terdapat potensi yang dapat terus dikembangkan, terutama pada sektor produksi pangan dan tata kelola keuangan yang sudah menunjukkan kinerja baik. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan sistem informasi dan validasi data, optimalisasi intervensi pada wilayah rawan pangan, peningkatan kolaborasi antar sektor dan daerah, serta inovasi dalam penyuluhan gizi dan distribusi pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di sektor ketahanan pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan dapat semakin efektif dan merata.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana mulai tahun 2021 hingga 2024 capaian selalu melampaui target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2024 mencapai 91,91 dari target 82,22. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program peningkatan ketahanan pangan, seperti penyediaan infrastruktur

penyimpanan, distribusi pangan yang membaik, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, capaian rendah di awal periode menunjukkan masih adanya kerentanan pada sistem pangan, terutama akibat dampak pandemi. Ke depan, tantangan utama terletak pada menjaga konsistensi capaian ini agar tidak bersifat sementara, serta memastikan pemerataan akses pangan di seluruh wilayah, terutama menghadapi ancaman perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi namun secara umum berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 88,2 dari target 83, namun sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 84, meskipun masih melampaui target 84. Capaian kembali meningkat signifikan pada 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 92,7 dan 91,31, dengan target yang juga terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat semakin mendekati komposisi ideal, mencerminkan keberhasilan dalam kampanye diversifikasi konsumsi pangan serta peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Meski demikian, tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pola konsumsi yang sehat di tengah dinamika harga dan ketersediaan pangan, serta memastikan bahwa peningkatan skor ini mencerminkan kondisi riil di seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil atau rentan pangan.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang

dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan	Rp497.198.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp449.550.400	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan	Rp3.495.938.705	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp3.321.117.124	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan Dan Perikanan	Rp148.266.900	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp146.562.200	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Pengelolaan Kendaraan	Rp1.012.945.	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp991.537.0	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A		

Operasional Urusan Pangan	666					05												
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	Rp4.2.28.8.18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp3.8.19.2.60.0	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Pengembangan Pertanian, Peternakan, Dan Kesehatan Hewan	Rp1.734.852.545	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp1.430.025.599	N/A	N/A	N/A	N/A	82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan Dan Perikanan	Rp1.3.80.4.87.0.77.2	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp1.3.23.5.96.0.63.4	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor	Rp6.7.79.5.94.9.33.3	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp5.8.31.3.02.2.84.8	N/A	N/A	N/A	N/A	86%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Urusan Pangan																		
Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	Rp9.977.424.513	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp9.806.051.470	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp1.2.837.632.089	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp1.2.481.298.053	N/A	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	N/A	Rp60.6.785.380.440	Rp1.241.088.096.692	Rp1.053.542.364.790	Rp795.373.542.140	N/A	Rp1.86.922.362.183	Rp1.223.565.133.389	Rp1.048.134.122.561	Rp793.00.639.099	N/A	30,81%	98,59%	99,49%	99,70%			
Program Pengawasan Keamanan Pangan	N/A	Rp1.157.463.747	Rp3.036.216.259	Rp3.120.273.099	Rp2.782.243.693	N/A	Rp1.134.988.933	Rp2.752.572.509	Rp3.039.042.360	Rp2.697.439.290	N/A	98,06%	90,66%	97,40%	96,95%			
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	N/A	Rp5.140.854.968	Rp8.341.138.898	Rp8.689.119.430	Rp1.012.467.09	N/A	Rp4.728.544.361	Rp7.827.614.285	Rp8.343.478.434	Rp9.629.135.799	N/A	91,98%	93,84%	96,02%	96,17%			

						2													
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	N/A	Rp86.981.000	Rp6.996.474	Rp8.690.010	Rp8.325.501	Rp8.911.790	N/A	Rp8.5.180	Rp6.379	Rp8.013	Rp7.967	N/A	97,9 3%	91,1 9%	92,2 1%	95,6 9%			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	N/A	Rp1.243.407.154	Rp2.289.563	Rp9.922.127	Rp9.477.251	Rp9.030	N/A	Rp1.236	Rp2.283	Rp9.746	Rp9.381	N/A	99,4 4%	99,7 3%	98,2 3%	98,9 9%			
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	N/A	Rp5.268.379.255	Rp2.068.1.53	Rp1.6.12	Rp1.4.13	Rp1.6.98	N/A	Rp4.440	Rp1.6.25	Rp1.4.56	Rp1.3.29	N/A	84,2 8%	78,6 0%	90,3 7%	94,0 3%			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	N/A	Rp1.356.569.831	Rp3.498.000	Rp9.017	Rp8.731	Rp8.656	N/A	Rp1.299	Rp3.398	Rp8.718	Rp8.479	N/A	95,8 0%	97,1 6%	96,6 9%	97,1 2%			
Program Pengendalian Dan	N/A	Rp60.252.500	Rp3.72.9	Rp6.45.3	Rp9.79.4	Rp9.11.6	N/A	Rp6.0.03	Rp3.8.00	Rp6.71.9	Rp6.36.6	Rp9.72.1	N/A	99,6 4%	99,7 3%	98,6 6%	99,2 6%		

Penanggulangan Bencana Pertanian			65	18	20		0	81	91	95							
Program Penyuluhan Pertanian	N/A	Rp37 9.96 1.69 9	Rp4 .416 .504 .498	Rp9 .403 .038 .712	Rp1 1.32 2.30 9.93 9	N/A	Rp3 58.2 53.3 60	Rp4 .208 .153 .906	Rp9 .286 .539 .252	Rp1 1.12 1.74 9.90 4	N/A	94,2 9% 94	95%	99%	98,2 3% 3%		
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	N/A	N/A	Rp7 .885 .065 .118	Rp2 9.50 6.55 9.73 3	Rp8 .738 .560 .772	N/A	N/A	Rp2 .740 .359 .731	Rp2 7.45 4.85 4.45 0	Rp8 .316 .359 .268	N/A	N/A	34,7 5% 5%	93,0 5% 5%	95,1 7% 7%		
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	N/A	N/A	Rp3 47.1 31.2 17	Rp6 93.0 83.2 44	Rp1 .270 .548 .300	N/A	N/A	Rp3 39.8 22.6 33	Rp6 26.2 22.5 99	Rp1 .135 .511 .248	N/A	N/A	97,8 9% 9%	90,3 5% 5%	89,3 7% 7%		
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	N/A	N/A	Rp4 .566 .448 .138	Rp5 .965 .214 .719	Rp4 .731 .890 .068	N/A	N/A	Rp4 .045 .958 .999	Rp5 .475 .646 .151	Rp4 .353 .582 .813	N/A	N/A	88,6 0% 0%	91,7 9% 9%	92,0 1% 1%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	Rp27 4.65 3.42 5.50 9	Rp2 70.0 85.6 82.2 94	Rp2 26.9 14.4 12.0 51	Rp2 24.9 19.4 32.2 87	N/A	Rp2 62.3 79.3 10.9 51	Rp2 52.2 60.0 67.3 77	Rp2 12.3 16.1 14.3 62	Rp2 11.7 39.3 20.7 53	N/A	N/A	N/A	93,5 7% 7%	94,1 4% 4%		

Provinsi																		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	N/A	N/A	N/A	Rp2 07.6 60.0 00	Rp2 07.6 60.0 00	N/A												

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada Tabel 2.5 diatas, kinerja pengelolaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari tingginya rasio realisasi terhadap anggaran pada sejumlah program prioritas, seperti Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, serta Program Penyuluhan Pertanian, yang secara konsisten mencapai angka di atas 95%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program yang menunjukkan capaian kurang optimal. Sebagai contoh, Program Pengelolaan pada tahun 2022 hanya menyerap sekitar 34,75% dari anggaran yang dialokasikan. Selain itu, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan serta Program Pengelolaan Wilayah Pesisir juga menunjukkan rasio realisasi yang berada di bawah 90% selama beberapa tahun terakhir.

Rendahnya capaian pada beberapa program tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain mekanisme penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berjalan efektif, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, serta kendala koordinasi lintas unit kerja maupun antarinstansi. Selain itu, ketergantungan terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah pusat turut memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan anggaran di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, Dinas memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pendanaan, terutama jika diikuti dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem perencanaan berbasis kebutuhan dan kapasitas pelaksana, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta pemanfaatan sistem pengendalian dan pelaporan yang lebih modern dan responsif. Dengan langkah-langkah

tersebut, efektivitas pelaksanaan program pelayanan publik dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Sub Sektor	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaku pedagang pangan segar di pasar tradisional dan modern
		Pemantauan stok dan harga pangan pokok	Pasar tradisional dan modern
		Pangan Bersubsidi	Penerima manfaat pangan subsidi
2	Kelautan	Pemeriksaan kapal nelayan, alat tangkap, izin usaha penangkapan ikan	Pemilik Kapal perikanan
		Penindakan pelanggaran kelautan	Pelaku usaha perikanan
3	Perikanan	Pemberian Bantuan Sarana Budidaya	Pembudidaya Ikan dan masyarakat di Wilayah DKI Jakarta
		Layanan	

No	Sub Sektor	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		Pemberian Benih Ikan Gratis Pelatihan Budidaya Ikan Pengendalian Penyakit serta Lingkungan Budidaya	
		Pembuatan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Izin Pembuatan Pemanfaatan Fasilitas BMD Pelayanan Kepelabuhan	Pelaku Usaha Perikanan Perorangan maupun Perusahaan
		Pengujian laboratorium	
4	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Vaksinasi Rabies, sterilisasi Hewan Penular Rabies, vaksinasi Brucellosis, vaksinasi Anthrax, vaksinasi Septicaemia Epizootica, vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	Hewan kesayangan dan ternak
		Pengamatan penyakit hewan / surveilans	Hewan kesayangan dan ternak
		Pelayanan pengobatan hewan melalui Mobil veteriner keliling dan Puskeswan stationer	Hewan kesayangan dan ternak
		Pelayanan rekomendasi perizinan lalu lintas hewan	Pemilik hewan kesayangan dan ternak

No	Sub Sektor	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		Pelayanan rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan hewan	Dokter hewan praktik, klinik hewan, rumah sakit hewan, pelaku usaha di bidang kesehatan hewan
		Pelayanan rekomendasi perizinan usaha peredaran obat hewan	Pelaku usaha peredaran obat hewan
		Pelayanan rekomendasi perijinan lalu lintas produk hewan	Pelaku usaha produk hewan
		Pelayanan rekomendasi importasi produk hewan	Pelaku usaha produk hewan
		Pelayanan sertifikasi nomor kontrol veteriner	Pelaku usaha produk hewan
		Pelayanan pemeriksaan hewan dan daging kurban	Masyarakat
		Pelayanan pemeriksaan antemortem dan postmortem	Pelaku usaha pemotongan
		Pelayanan pengujian produk peternakan	Produk hewan
		Pelayanan pengujian diagnostik penyakit hewan	Hewan kesayangan dan ternak
5	Pertanian	Membantu dan menjembatani pelaku usaha dalam promosi hasil pertanian (pameran, expo, festival, media sosial)	Petani, pelaku usaha pertanian, masyarakat umum

No	Sub Sektor	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		Layanan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pelaku usaha pertanian, eksportir, distributor pangan
		Pengujian laboratorium (residu pestisida, logam berat, mikrobiologi, mikotoksin, mutu beras, dll)	Produsen, pelaku usaha, instansi, masyarakat
		Fasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku usaha pertanian	Pelaku usaha pertanian, petani, kelompok tani
		Pelayanan Bibit Tanaman, Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya dan olahan hasil pertanian	Mayarakat, kelompok tani dan pelaku usaha pertanian
		Pelayanan Bibit Tanaman secara online melalui SIFEBI (Sistem permohonan Bibit), Pelayanan Klinik Tanaman	Masyarakat, Instansi Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Anak Sekolah

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan kepada berbagai kelompok sasaran, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha dalam sektor pangan, kelautan, pertanian, peternakan, dan perikanan, hingga instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan. Pada sektor pembinaan usaha, layanan ditujukan bagi pelaku usaha dan pembudidaya ikan melalui pendampingan, bantuan sarana, penyediaan benih ikan, serta pelatihan budidaya. Di bidang perikanan, sasaran layanan adalah pelaku usaha perorangan maupun perusahaan dengan bentuk layanan berupa

penerbitan sertifikat kelayakan, izin pemanfaatan fasilitas, serta pelayanan kepelabuhanan.

Pada bidang peternakan dan kesehatan hewan, layanan menyangkut pemilik hewan kesayangan, peternak, dokter hewan, hingga pelaku usaha produk hewan. Bentuk layanan meliputi vaksinasi, pengobatan, surveilans penyakit, rekomendasi lalu lintas hewan dan produk, hingga pemeriksaan hewan dan daging kurban. Melalui Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Pusyankeswannak), Dinas KPKP juga memberikan layanan pemeriksaan, pengujian produk peternakan, dan diagnosa penyakit hewan. Di sektor pertanian, layanan meliputi promosi dan pemasaran hasil pertanian, sertifikasi keamanan pangan segar, serta pengujian mutu hasil pertanian yang ditujukan bagi petani, pelaku usaha, eksportir, distributor, maupun masyarakat luas. Selain itu, fasilitasi pengembangan usaha, penyediaan bibit tanaman, serta layanan Klinik Tanaman melalui SIFEBI ditujukan bagi masyarakat, kelompok tani, instansi, swasta, hingga kalangan akademisi.

Dengan cakupan sasaran yang beragam, layanan Dinas KPKP bersifat inklusif dan bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan, dan peternakan, serta menjaga kesehatan hewan di wilayah DKI Jakarta.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Korwas PPNS Polri	Pelaku pedagang pangan segar di pasar tradisional dan modern	Pengawasan Keamanan Pangan
2	Pangkalan PSDKP	Kapal perikanan	Patroli sumberdaya kelautan perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menjalin kemitraan dengan berbagai perangkat daerah dan instansi pusat guna mendukung pelaksanaan program dan layanan. Pada sektor Pangan, kerja sama dilakukan dengan Korwas PPNS Polri dan Perumda Pasar Jaya yang berfokus pada layanan pengawasan keamanan pangan terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Selain itu Dinas KPKP juga menjalin kerjasama dengan BUMD Perumda Pasar Jaya, PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya dalam distribusi penyaluran pangan bersubsidi.

Di sektor Kelautan, Dinas KPKP bermitra dengan Pangkalan PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan untuk mendukung layanan patroli laut dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah:

Tabel 2.8 Dukungan BUMD

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1	Bank DKI	Penyediaan mesin EDC dan data transaksi pada kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu
2	Perumda Pasar Jaya	Distribusi Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu serta dukungan data harga dan stok pasokan pangan
3	Perumda Dharma Jaya	Distribusi Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu serta dukungan data harga dan stok pasokan pangan

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
4	PT. Food Station Tjipinang Jaya	Distribusi Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu serta dukungan data harga dan stok pasokan pangan

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta memperoleh dukungan dari sejumlah BUMD dalam rangka penguatan program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Bank DKI berperan melalui penyediaan aplikasi dan mesin EDC, serta fasilitasi transaksi pada kegiatan pangan murah. Perumda Pasar Jaya , PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya mendukung penyediaan komoditas pangan pokok, serta data harga dan stok pasokan.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Tabel 2.9 Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja sama	Bentuk Kerja sama
-----------	-------------------------	--------------------------

No	Mitra Kerja sama	Bentuk Kerja sama
1	IPB	Fasilitasi praktik kerja mahasiswa
2	FKH UGM	Fasilitasi praktik kerja mahasiswa
3	FKH UNAIR	Fasilitasi praktik kerja mahasiswa
4	Pusat Kajian Ilmu Halal IPB	Pelatihan Juru Sembelih Halal
5	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Dukungan sterilisasi serta vaksinasi hewan penular rabies dan hewan ternak.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi profesi. Kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM), serta Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (FKH UNAIR) difokuskan pada fasilitasi praktik kerja mahasiswa, sebagai upaya mendukung pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang pertanian dan kesehatan hewan.

Selain itu, Dinas KPKP juga bekerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Halal IPB dalam penyelenggaraan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) guna mendukung penerapan standar halal pada rantai produksi pangan asal hewan. Di sisi lain, kerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) diwujudkan dalam bentuk dukungan sterilisasi serta vaksinasi hewan penular rabies dan hewan ternak, yang bertujuan meningkatkan

kesehatan masyarakat sekaligus pengendalian penyakit zoonosis di wilayah DKI Jakarta.

Melalui kerja sama strategis tersebut, Dinas KPKP dapat memperkuat aspek akademik, teknis, serta kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan terwujudnya layanan publik yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar keamanan pangan serta kesehatan hewan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rusaknya Ekosistem Pesisir dan Laut	Konflik Pemanfaatan Ruang Laut	Tumpang Tindih Kewenangan, Kepentingan dan Regulasi dalam Pengelolaan Ruang Laut dengan Pemerintah Pusat Ketidakharmonisan Kebutuhan dan Keinginan antara Masyarakat, Pemerintah dan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil
			kurangnya kolaborasi dan partisipasi stakeholder tingkat nasional dan internasional
			Keterbatasan sarana prasarana pendukung pengendalian pemanfaatan ruang laut
	Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan		Belum adanya Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru
	Pelanggaran dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perundungan terkait Pemanfaatan SDKP
			Kebutuhan yang tinggi untuk pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, pasir laut, Biota dll)
			Keterbatasan sarana prasarana pendukung pengawasan dan penegakan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			hukum
			Keterbatasan SDM pendukung pengawasan dan penegakan hukum
		Kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Laut yang di sebabkan Kegiatan Manusia	Belum adanya Kawasan Konservasi di Perairan yang di kelola sesuai Peraturan Perundungan yang Berlaku Pencemaran laut dari limbah industri dan pariwisata
			Kurangnya Kesadaran akan Cinta Ekosistem Pesisir Laut dan Pulau - Pulau Kecil
			Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil
2	Keterbatasan lahan budidaya ikan di perkotaan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan	Di perkotaan, lahan yang tersedia untuk kegiatan budidaya perikanan sangat terbatas, sehingga membatasi skala kegiatan dan jenis ikan yang dapat dibudidayakan,

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			maka perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatan lahan yang terbatas dengan teknologi budidaya super intensif (padat tebar tinggi dengan luasan budidaya yang terbatas)
3	Semakin berkurangnya lahan terbuka hijau akibat alih fungsi lahan	Luas baku sawah yang menurun setiap tahun	Ketergantungan pasokan bahan pangan dari wilayah lain
		Lahan yang dikelola merupakan lahan garapan milik pengembang	
4	Keterbatasan akses pemasaran bagi pelaku usaha pertanian	Kesulitan dalam menjangkau akses pasar	Kurangnya SDM pelaku usaha hasil pertanian yang menguasai digital marketing dan kualitas produk yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan oleh pasar
5	Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Sektor Kelautan (Jasa Kelautan)	Belum Optimalnya Investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan	Belum Adanya Regulasi Pendukung untuk Memberikan Kepastian Hukum dan Kemudahan untuk Investasi di Sektor Kelautan
			Kurangnya insentif bagi investor dalam

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			pengembangan sektor kelautan
			Kurangnya sinergi antar sektor dalam pengelolaan ekonomi kelautan
		Pengembangan wisata bahari belum optimal	Regulasi pariwisata bahari masih belum terintegrasi dengan konsep keberlanjutan lingkungan
		Pemanfaatan bioteknologi kelautan masih rendah	Minimnya riset dan inovasi dalam eksplorasi sumber daya hayati laut untuk sektor farmasi, kosmetik, dan pangan
6	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan
			Pendidikan masyarakat pesisir yang masih rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			SDKP
			Rendahnya keterlibatan masyarakat pesisir lokal terhadap pemanfaatan ruang laut
			Sulitnya akses permodalan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha
		Ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil	Kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat pesisir
			Belum optimalnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil
7	Kualitas air menurun & pencemaran lingkungan	Terjangkitnya hama dan penyakit pada ikan, pertumbuhan ikan lambat hingga menyebabkan kematian masal	Kualitas air di perkotaan (air sungai dan laut) telah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, dan aktivitas lainnya, yang dapat membahayakan ikan yang dibudidayakan,

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			sehingga perlu dilakukan pemantauan kualitas air yang rutin untuk pencegahan hama dan penyakit, pengelolaan limbah yang baik dan penerapan teknologi manajemen air yang baik
8	Mahalnya harga pakan ikan	Harga pakan pabrikan yang berkualitas cukup mahal dan kurang terjangkau untuk pembudidaya terutama pembesaran ikan konsumsi karena waktu pemberian pakan yang cukup lama	Belum adanya penyedia pakan yang berkualitas dengan harga terjangkau/murah, terutama untuk pembudidaya ikan yang membutuhkan pakan khusus dengan protein tinggi, sehingga masih diperlukan subsidi pakan, edukasi pembuatan pakan mandiri dan pakan alternatif berkualitas sebagai pengganti pelet pabrikan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
9	Ketersediaan benih ikan yang berkualitas terbatas	Kurangnya sarana, prasarana dan pasokan air yang memadai	Terbatasnya sarana, prasarana dan ketersediaan pasokan air yang sesuai standar di Balai Benih Ikan, sehingga jumlah produksi benih yang dihasilkan belum dapat ditingkatkan kapasitasnya, jika pada musim kering BBI sering kesulitan mendapatkan air yang sesuai standar budidaya
10	Keterbatasan induk bersertifikat	Terbatasnya induk bersertifikat	Terbatasnya induk bersertifikat menyebabkan jumlah produksi dan kualitas benih ikan yang dihasilkan menurun, sehingga perlu adanya bantuan induk bersertifikat, karena pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mencetak induk unggul
11	Sulitnya perizinan	Pembudidaya sulit dalam mendapatkan legalitas usahanya	Sulitnya penerapan standar CBIB & CPIB untuk pembudidaya kecil di perkotaan sedangkan untuk

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			pembudidaya di laut terkendala dengan lokasi budidaya yang belum sesuai dengan RTRW (masuk dalam Kawasan Taman Nasional)
1 2	Rendahnya kapasitas SDM pembudidaya	Kurangnya keterampilan managerial, produksi dan pemasaran para pembudidaya	Belum adanya peningkatan kompetensi pembudidaya yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi Pembudidaya tidak menguasai managerial, produksi dan pemasaran, hanya terfokus pada aktivitas harian yang cukup padat
1 3	Penerapan teknologi masih tradisional dan semi tradisional	Sarana dan prasarana terbatas	Belum optimalnya akses permodalan untuk menunjang peningkatan kapasitas teknologi pembudidaya menjadi teknologi intensif dan super intensif
		Kurangnya update informasi, pengetahuan dan teknologi terbarukan oleh pembudidaya	Belum maksimalnya kegiatan seminar, pelatihan dan workshop terkait

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			dengan IPTEK terbarukan yang mampu menunjang peningkatan kapasitas dan skill pembudidaya
1 4	Perlunya promosi dan kontes ikan hias	Menurunnya produksi & pendapatan pelaku usaha ikan hias	Kurangnya akses promosi dan kontes ikan hias untuk meningkatkan animo masyarakat baik dari breeder, seller maupun penghobies sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
1 5	Terbatasnya akses pasar	Belum tersedianya akses pasar yang pasti dan kontinuitas	Belum tersedianya raisher sebagai pusat penjualan, promosi dan pemasaran ikan konsumsi dan ikan hias, yang menjamin ketersediaan, kualitas dan kontinuitas ikan
1 6	Rendahnya kapasitas SDM Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			kurangnya jumlah petugas pembina di lapangan
1 7	Masih adanya produk olahan perikanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan	Banyaknya UPI yang belum memenuhi syarat sanitasi dan higiene	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan UPI ttg syarat-syarat standar Hygiene dan sanitasi dalam pengolahan ikan
			kurangnya sarana yang memenuhi standar pada UPI
			Masih maraknya penggunaan bahan kimia berbahaya di masyarakat
1 8	Banyaknya kapal perikanan yang tidak memiliki pangkalan	Jumlah pelabuhan terbatas	Tidak adanya pengembangan dan penambahan pelabuhan yang baru
			- Kapasitas Pelabuhan yang tersedia sangat terbatas
			- Minggrasi perizinan pelayanan diambil alih oleh Pemerintah Pusat (KKP)
1 9	Keterbatasan daerah penangkapan ikan di bawah 12 mil	Daerah penangkapan ikan nelayan sulit diakses dan semakin jauh	Dampak Pencemaran limbah dan kegiatan pembangunan di sepanjang pesisir pantai

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2 0	Keterbatasan BBM bagi nelayan	Jumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan tidak semua ada pada centra perikanan	<p>Keterbatasan kuota BBM dan jarak pengisian SPDN bagi nelayan kecil</p> <p>- Penambahan jumlah kapal perikanan yang tidak dapat diprediksi, tidak sebanding dengan kuota BBM yang disediakan oleh PERTAMINA, akibat perizinan yang diambil alih oleh Pusat (KKP)</p> <p>- Pertambahan jumlah kapal perikanan tidak seimbang dengan kuota BBM yang tersedia</p>
2 1	Rendahnya kapasitas SDM Nelayan kecil dalam perizinan berusaha	Perizinan berusaha sulit diakses bagi nelayan kecil	Masih Banyak Kelengkapan Dokumen Persyaratan dan Panjangnya Alur Proses Perizinan bagi nelayan kecil dan nelayan dengan kapal perikanan di bawah 30 GT, Dimana beberapa dokumen persyaratan ditebitkan oleh pemerintah pusat

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
2 2	Kelompok usaha bersama (KUB) dan Koperasi perikanan tangkap tidak berkembang	Kurang pahamnya pengurus KUB dan Koperasi dalam pengelolaan kelompok yang baik	Latar belakang pendidikan dan tidak mengikuti perkembangan kelembagaan organisasi
2 3	Konflik Antar Nelayan	Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang	Wilayah Penagkapan Ikan yang terbatas, dan sumberdaya ikan yang terbatas mengakibatkan nelayan memodifikasi alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan penempatkannya tidak sesuai jalur yang sudah ditentukan
2 4	Pengelolaan pelabuhan perikanan tidak optimal	Kurangnya SDM dan tidak adanya rehabilitasi pelabuhan	penerimaan SDM terbatas dan anggaran rehab pelabuhan tidak ada
2 5	data produksi perikanan tangkap tidak real-time	tidak adanya sistem online produksi perikanan tangkap	Kurangnya SDM pencatatan produksi perikanan di pelabuhan dan tidak ada anggaran untuk membuat sistem produksi perikanan tangkap
			- Terbatasnya anggaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau sarana dan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			prasarana
2 6	Tidak tercapainya target skor PPH	<p>1. Jakarta tidak memiliki sumber pangan lokal yang berlimpah</p> <p>2. Gaya hidup (pola hidup yang instan/cepat)</p> <p>3. Sosioculture warga Jakarta yang beragam (faktor ekonomi, sosial, pendidikan, gaya hidup, pengetahuan, aksesibilitas)</p>	<p>1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang baik</p> <p>2. Kebijakan Ketahanan Pangan yang belum terpadu</p> <p>3. Metode sampling penghitungan oleh BPS belum mensasar penerima manfaat program intervensi Pemprov DKI Jakarta</p>
2 7	Tidak tercapainya target skor Prevalence of Undernourishment (PoU)	1. Menurunnya angka PPH Jakarta (Tahun 2024: 91,31 dan Tahun 2023: 92,70)	1. Intervensi penurunan PoU merupakan tugas multi sektoral karena PoU dihitung berdasarkan beberapa indikator, antara lain: persentase penduduk miskin, produksi rata-rata padi, kepadatan penduduk, umur harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumi, pendidikan dan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			percentase rumah tangga tanpa akses air bersih
	2. Menurunnya produksi padi di Jakarta (Tahun 2024 Angka Sementara: 2.466,37 ton dan Tahun 2023 Angka Tetap: 2.674,28 ton)	2. Kebijakan Ketahanan Pangan yang belum terpadu	
	3. Meningkatnya tingkat kepadatan penduduk Jakarta (Tahun 2024: 16.165 jiwa/m ² dan Tahun 2023: 16.146 jiwa/m ²)	3. Program perlindungan sosial yang dilakukan belum efektif baik dari sisi target maupun jenis bantuan	
	4. Menurunnya angka pertumbuhan ekonomi Jakarta (Tahun 2024: 4,90 dan Tahun 2023: 4,96)	4. Belum dilakukannya penghitungan dampak perlindungan sosial yang dijalankan terhadap penurunan angka kerawanan pangan level Provinsi	
	5.Berkurangnya konsumsi terhadap komoditas tertentu yang merupakan imbas dari kenaikan harga per kalorinya (harga per kalori di DKI Jakarta 2	5. Metode sampling penghitungan oleh BPS belum mensasar penerima manfaat program	

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		kali lebih besar dibandingkan harga per kalori di level Nasional)	intervensi Pemprov DKI Jakarta
		6. Penurunan daya beli masyarakat	6. Tingkat fluktuasi harga pangan mempengaruhi daya beli masyarakat
2 8	banyaknya tempat pemotongan unggas diluar RPHU yang berdampak terhadap keamanan produk hewan	terbatasnya jumlah, kapasitas dan fasilitas RPHU yang dikelola oleh DKPKP	tingginya kebutuhan masyarakat akan daging ayam segar
2 9	Terkendalanya pelaksanaan Sertifikasi nomor kontrol veteriner sebagai bukti penerapan higiene sanitasi pada tempat pemotongan hewan	kesulitan dalam pengingkatan legalitas tempat pemotongan hewan (ruminansia dan unggas)	penentuan zonasi wilayah
3 0	pelaksanaan penyembelihan hewan kurban belum memenuhi aspek kehalalan dan kesejahteraan hewan	Terbatasnya jumlah juru sembelih halal yang telah tersertifikasi di Provinsi DKI Jakarta	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyembelihan halal, aspek kesehatan masyarakat veteriner dan aspek kesejahteraan hewan

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3 1	penjaminan keamanan produk hewan yang dijual di pasar tradisional belum optimal	Tidak ada regulasi/standar penerapan higiene sanitasi di pasar tradisional	Kurangnya kesadaran pedagang dan pengelola pasar dalam penerapan higiene sanitasi dan pemanfaatan rantai dingin
3 2	Populasi ternak menurun	berkurangnya jumlah peternak	terdesaknya usaha peternakan karena padatnya penduduk dan keberadaan ternak serta limbah ternak yang dihasilkan mengganggu lingkungan dan masyarakat
3 3	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha di DKI Jakarta terhadap proses sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, khususnya pangan segar asal tumbuhan, sehingga menghambat upaya peningkatan daya saing produk lokal.	<p>1. Kesadaran pelaku usaha di DKI Jakarta terhadap pentingnya sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil pertanian masih rendah.</p> <p>2. Ada beberapa faktor yang menghambat kepatuhan pelaku usaha dalam proses sertifikasi pangan segar asal tumbuhan.</p> <p>3. Rendahnya partisipasi pelaku usaha berdampak pada daya saing produk pertanian lokal di pasar.</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang manfaat dan prosedur sertifikasi kepada pelaku usaha.</p> <p>2. Terbatasnya insentif atau dukungan yang memotivasi pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi.</p> <p>3. Prosedur sertifikasi yang dianggap rumit dan memakan waktu sehingga pelaku usaha enggan mengikuti.</p>

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>4. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis di PPSHP untuk menjangkau seluruh pelaku usaha secara menyeluruh.</p>
			<p>5. Persepsi pelaku usaha yang masih menganggap sertifikasi tidak memberikan nilai tambah langsung bagi usahanya.</p>
3 4	Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian	<p>1. Laboratorium pengujian mutu hasil pertanian PPSHP yang telah terakreditasi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.</p> <p>2. Tingkat pemanfaatan layanan pengujian mutu oleh pelaku usaha belum sebanding dengan kapasitas dan kompetensi laboratorium yang tersedia.</p> <p>3. Masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat layanan pengujian mutu hasil pertanian.</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pengujian mutu produk hasil pertanian.</p> <p>2. Minimnya insentif atau regulasi yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengujian secara rutin.</p> <p>3. Persepsi bahwa pengujian mutu memerlukan biaya dan waktu tambahan yang tidak efisien bagi usaha kecil-menengah.</p>

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>4. Belum terbangunnya kolaborasi yang intensif antara laboratorium dengan asosiasi atau komunitas pelaku usaha.</p>
3 5	Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian	Promosi hasil pertanian lokal masih belum menjangkau pasar modern dan digital secara optimal, sehingga membatasi pertumbuhan dan daya saing pelaku usaha pertanian di wilayah perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya integrasi promosi dengan ekosistem digital dan retail modern. - Keterbatasan sumber daya untuk pelatihan, fasilitasi branding, dan promosi berbasis teknologi. - Promosi masih bersifat event-based, belum menjadi program berkelanjutan dan terstruktur. - Belum tersedia platform digital terpadu yang menghubungkan pelaku usaha, produk, dan konsumen.C69
3 6	Kurangnya keterpaduan sistem informasi dan data pelayanan:	Sistem informasi dan data pelayanan di PPSHP belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menghambat efisiensi operasional, transparansi layanan,	<p>1. Belum adanya sistem informasi terpadu lintas layanan (laboratorium, sertifikasi, promosi, retribusi, dll).</p>

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		dan pengambilan keputusan berbasis data.	<p>2. Infrastruktur digital dan SDM pengelola data belum sepenuhnya mendukung integrasi sistem.</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk otomasi dan pelaporan.</p> <p>4. Tidak adanya standarisasi format data dan mekanisme berbagi informasi antar unit.C74</p>
3 7	Tingkat pemungutan retribusi belum optimal:	Pemungutan retribusi atas layanan PPSHP belum mencapai potensi maksimal karena masih terdapat kendala dalam pemahaman prosedur oleh wajib retribusi serta terbatasnya akses terhadap sistem layanan digital.	<p>1. Sosialisasi mengenai kewajiban dan prosedur retribusi belum merata.</p> <p>2. Sistem layanan digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran.</p> <p>3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib retribusi.</p> <p>4. Terbatasnya kanal atau sarana pembayaran yang mudah diakses</p>

N o	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			masyarakat.

Hasil pemetaan permasalahan pelayanan menunjukkan bahwa DKPKP Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan strategis yang mencakup sektor pangan, kelautan, perikanan, dan pertanian. Pada bidang ketahanan pangan, permasalahan utama ditandai dengan belum tercapainya target Pola Pangan Harapan (PPH) serta angka Prevalence of Undernourishment (PoU). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terkait pola konsumsi pangan, kebijakan ketahanan pangan yang belum terpadu, penurunan produksi pangan lokal, meningkatnya kepadatan penduduk, fluktuasi harga, serta keterbatasan efektivitas program perlindungan sosial.

Di bidang kelautan dan perikanan, permasalahan yang dihadapi antara lain degradasi ekosistem pesisir dan laut, konflik pemanfaatan ruang laut, keterbatasan investasi pada sektor jasa kelautan, rendahnya kapasitas SDM masyarakat pesisir, keterbatasan lahan budidaya ikan di perkotaan, penurunan kualitas air akibat pencemaran, serta mahalnya harga pakan ikan. Selain itu, ketersediaan benih unggul, induk bersertifikat, dan kemudahan perizinan juga masih terbatas, sementara kapasitas SDM pembudidaya dan nelayan kecil dalam aspek manajerial, produksi, maupun pemasaran masih rendah.

Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap, di mana keterbatasan sarana pelabuhan, akses BBM bagi nelayan, maraknya konflik antar nelayan, serta belum optimalnya pengelolaan data produksi perikanan masih menjadi kendala. Dari sisi kesehatan hewan, keterbatasan kapasitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), keterlambatan sertifikasi, serta minimnya

jumlah Juru Sembelih Halal juga menjadi permasalahan penting, disertai dengan penurunan populasi ternak akibat keterbatasan lahan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap penerapan standar keamanan pangan.

Sementara itu, di sektor pertanian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan lahan budidaya di wilayah perkotaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi pangan segar, pemanfaatan laboratorium pengujian mutu yang belum optimal, serta masih terbatasnya akses pemasaran, khususnya pada pasar modern dan digital. Hambatan lain yang teridentifikasi adalah belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan, tingkat pemungutan retribusi yang belum optimal, serta promosi hasil pertanian yang belum berkesinambungan.

Secara keseluruhan, pemetaan permasalahan ini menggambarkan bahwa pelayanan DKPKP masih menghadapi tantangan multidimensi, baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang terpadu, kolaboratif, serta berkelanjutan guna mewujudkan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pertanian perkotaan di DKI Jakarta.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program,

serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 telah ditetapkan visi: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya luas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan perikanan secara berkelanjutan
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 telah ditetapkan visi : Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan petani
2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
3. Meningkatnya cadangan pangan nasional
4. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk eksport pertanian

5. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
6. Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian
7. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Penularan Penyakit Akibat Hewan dan Produk Hewan
8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
	Pendukung	Penghambat
<p>a. Terbatasnya cakupan promosi hasil pertanian lokal ke pasar modern dan platform digital yang membatasi perluasan pasar.</p> <p>b. Kurangnya keterpaduan sistem informasi dan data pelayanan yang menyebabkan inefisiensi dan keterlambatan pengambilan keputusan.</p>	<p>a. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelaku usaha untuk pelatihan dan promosi.</p> <p>b. Kebijakan daerah yang mendukung pengembangan pertanian perkotaan dan teknologi informasi.</p>	<p>a. Sistem informasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh.</p> <p>b. Keterbatasan jaringan pemasaran di pasar modern dan digital.</p>
<p>a. Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) akibat perubahan kebijakan OKKPD yang menghilangkan kewajiban izin bagi sebagian pelaku usaha.</p>	<p>a. Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi dan menerapkan standar internasional.</p> <p>b. Sarana dan prasarana pengujian serta</p>	<p>a. Perubahan kebijakan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha pertanian dalam sertifikasi.</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi dan edukasi</p>

Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
	Pendukung	Penghambat
<p>b. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian meskipun sudah terakreditasi dan menerapkan standar ISO/IEC 17025:2017.</p> <p>c. Tingkat pemungutan retribusi dari layanan pengujian dan sertifikasi hasil pertanian belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib retribusi dan akses layanan digital yang terbatas.</p>	<p>c. Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan mutu pangan.</p>	<p>tentang prosedur dan manfaat layanan retribusi.</p> <p>c. Akses layanan digital yang belum mudah dan merata.</p>
<p>a. Kapasitas RPHU yang dikelola DKPKP belum mencukupi, sehingga masih banyak tempat pemotongan unggas di luar RPHU</p> <p>b. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha peternakan dalam sertifikasi nomor kontrol veteriner</p> <p>c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyembelihan halal</p> <p>d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesehatan</p>	<p>Komitmen pemerintah daerah dalam kualitas pelayanan sertifikasi dan penjaminan keamanan pangan asal hewan</p>	<p>Keterbatasan SDM teknis</p>

Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
	Pendukung	Penghambat
masyarakat veteriner di unit usaha produk hewan (budidaya, pasar, ritel, tempat pemotongan, dan tempat pemotongan hewan kurban)		
a. Belum efektifnya penerapan IUU (Illegal, Unregulation, Unreported) Fishing b. Belum terwujudnya sistem rantai dingin hasil tangkapan ikan laut	a. Bidang Kelautan mempunyai RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Provinsi DKI Jakarta b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya additive semakin baik	a. Pencemaran laut yang bersumber dari sampah daratan, dan berbagai sumber lainnya b. Lemahnya koordinasi akibat konflik kewenangan c. Dibutuhkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan dan perbaikan ekosistem
a. Keterbatasan lahan akibat pertumbuhan kawasan pembangunan perumahan b. Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pembinaan pelaku usaha	a. Kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium b. Sebagai pusat pemerintahan, mempunyai kemudahan akses ke pasar domestik dan luar negeri untuk pemasaran pasca panen	a. Pertumbuhan kebutuhan konsumsi lebih tinggi daripada pertambahan lahan pertanian dan peternakan b. Belum maksimal pemanfaatan teknologi untuk mengelola lahan terbatas

Secara keseluruhan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dalam mendukung sasaran K/L mencakup aspek keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi pelaku usaha, serta keterbatasan SDM. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas teknis, serta optimalisasi teknologi informasi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan pangan di DKI Jakarta secara lebih efektif.

2.2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2044. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta Pertanian memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Memanfaatkan lahan aset Pemerintah Daerah menjadi pertanian kota	Ketersediaan lahan milik pemerintah dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.	Terbatasnya lahan yang bisa dipakai untuk pertanian kota dan rendahnya minat masyarakat untuk beralih ke pertanian kota.

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
2	Mendorong pemilik lahan dan bangunan gedung untuk menjalankan pertanian kota	Kesadaran masyarakat akan manfaat pertanian kota.	Kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang pertanian kota dan rendahnya keuntungan ekonomi bagi pemilik lahan.
3	Memperkuat kerja sama dengan daerah penyanga yang merupakan daerah sentra pangan dalam hal ketahanan pangan	Kerja sama antar daerah yang saling mendukung dan teknologi informasi yang mendukung pertukaran data pangan.	Kurangnya koordinasi antara daerah penyanga dan pusat dan keterbatasan akses atau infrastruktur teknologi.
4	Pemulihian kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang berkelanjutan	Kerusakan ekosistem pesisir yang parah dan kesulitan dalam koordinasi antar pemangku kepentingan.
5	Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM pesisir dan Kepulauan Seribu	Pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan kapasitas SDM, pembentukan kelompok masyarakat yang mampu mengelola kawasan pesisir.	Keterbatasan dana untuk pendidikan dan pelatihan dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal.
6	Pengelolaan wilayah pesisir untuk mengembangi habitat dan sumber daya alam hayati	Adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan kesadaran akan pentingnya ekosistem	Kerusakan habitat yang sudah terjadi dan sulitnya melakukan pengelolaan yang berkelanjutan.

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pesisir.	
7	Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut	Dukungan dari organisasi internasional dan nasional untuk konservasi dan kemajuan dalam ilmu lingkungan.	Terbatasnya dana untuk rehabilitasi dan kerusakan yang sudah berlangsung lama.
8	Rehabilitasi pantai yang mengalami kerusakan	Ketersediaan teknologi rehabilitasi pantai dan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.	Kerusakan yang sangat parah dan kesulitan dalam pendanaan dan logistik.
9	Penanaman vegetasi pantai di pulau-pulau	Partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya vegetasi pantai serta keterbatasan dana dan SDM
10	Mengembangkan sentra-sentra perikanan di utara Jakarta	Potensi sumber daya perikanan yang besar dan peningkatan permintaan produk perikanan.	Kerusakan ekosistem pesisir yang mengurangi hasil perikanan dan kurangnya infrastruktur yang mendukung.
11	Memberikan akses pada nelayan untuk penangkapan dan pengembangan budidaya perikanan	Program pelatihan untuk nelayan dan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.	Ketergantungan pada metode penangkapan tradisional serta kebijakan yang tidak mendukung nelayan kecil.
12	Merehabilitasi seluruh pantai, pulau, dan perairan yang terdegradasi baik pada	Adanya teknologi rehabilitasi yang efektif.	Sumber daya yang terbatas dan kerusakan yang sudah sangat

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	pulau dengan fungsi lindung/konservasi maupun pulau-pulau dengan fungsi budidaya		luas
13	Mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan fungsi ekosistem <i>mangrove</i> , cagar alam, dan suaka margasatwa di kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu	Kesadaran global tentang pentingnya ekosistem mangrove dan dukungan internasional untuk konservasi.	Penyalahgunaan lahan dan pembangunan yang merusak ekosistem serta sulitnya penegakan hukum.
14	Mengembangkan sentra industri perikanan inklusif berskala global di kawasan pesisir utara Jakarta	Permintaan pasar global yang terus meningkat serta keberadaan infrastruktur yang mendukung.	Persaingan yang ketat dari industri serupa
15	Mengembangkan infrastruktur bawah laut	Teknologi yang berkembang pesat dan kebutuhan untuk konektivitas global	Biaya tinggi dan risiko teknis yang terkait dengan pembangunan infrastruktur bawah laut.
16	Mengembangkan sistem logistik perairan berskala global	Pertumbuhan ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional.	Persaingan internasional yang ketat dan kesulitan dalam pembangunan fasilitas logistik yang efisien.
17	Penyediaan ruang untuk mengembangkan metoda pertanian hortikultura yang mengacu pada karakteristik ruang	Kebutuhan akan produk hortikultura yang semakin meningkat dan adanya teknologi	Keterbatasan lahan yang cocok untuk pertanian hortikultura dan perubahan iklim yang mempengaruhi

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	dan kawasan	pertanian yang lebih efisien.	hasil pertanian.
18	Membangun kerja sama dengan produsen pertanian dari sekitar wilayah Jakarta	Potensi pasar yang besar di Jakarta dan kedekatan geografis antara produsen dan konsumen.	Persaingan dengan produsen lain dan keterbatasan jaringan distribusi yang efisien.
19	Lokasi Budidaya yang tidak sesuai dengan RTRW (masuk dalam Kawasan Taman Laut Nasional)	Perlunya solusi yang tepat untuk pemberian izin sehingga penerapan budidaya sesuai dengan standar CPIB dan CBIB	Sulitnya mendapatkan sertifikat CBIB terutama untuk pembudidaya KJA Air Laut karena termasuk dalam Daerah Perlindungan Laut/Wilayah Konservasi
20	Terbatasnya lokasi usaha peternakan dalam RTRW sehingga mempersulit proses perijinan berusaha	Potensi pasar terhadap kebutuhan akan pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Ketidakjelasan dalam perijinan berusaha mempersulit proses sertifikasi nomor kontrol veteriner

Sumber: Dokumen RTRW Tahun 2024-2044 Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan tabel yang disusun, dapat dianalisis bahwa implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Faktor pendorong utama yang teridentifikasi adalah pentingnya kerja sama antar daerah, pemerintah, dan masyarakat. Kerja sama yang baik, terutama dalam hal pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi kunci keberhasilan dalam banyak program, seperti pertanian kota dan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan teknologi juga menjadi pendorong utama, di mana pelatihan yang tepat dan penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) dapat meningkatkan efektivitas program. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan dukungan dari lembaga internasional juga berperan penting dalam mendukung konservasi ekosistem dan pengelolaan perikanan.

Namun, meskipun ada faktor pendorong yang kuat, berbagai hambatan masih menghalangi implementasi RTRW. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi kendala utama dalam banyak program, seperti rehabilitasi pantai dan pengelolaan wilayah pesisir, yang membutuhkan dana dan fasilitas yang memadai. Selain itu, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program-program seperti pertanian kota dan konservasi vegetasi pantai juga menjadi penghambat signifikan. Program-program ini memerlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari partisipasi mereka. Persaingan yang ketat, terutama dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta kebijakan yang kurang mendukung atau tidak konsisten juga menghambat perkembangan sektor ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi RTRW sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola faktor-faktor pendorong seperti kerja sama antar daerah dan peningkatan kualitas SDM, serta mengatasi faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan yang tercantum dalam RTRW dapat tercapai dengan baik.

2.2.2.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan masih rendah
- b) Permasalahan pesisir dan pulau reklamasi
- c) Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

Tabel 2.13 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang Relevan dengan PD			Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD	Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional		
Pangan	Tidak ada regulasi/standar penerapan higiene sanitasi di pasar tradisional				Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan keamanan pangan	Penjaminan keamanan pangan segar asal pertanian, hewan dan perikanan
	Distribusi pangan bersubsidi			Verifikasi data penerima manfaat	Penerima manfaat pangan bersubsidi	Penguatan Ketahanan Pangan
Kelautan	Rusaknya Ekosistem Pesisir dan Laut	Perubahan iklim	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	Penggunaan alat tangkap yang dilarang	Tumpang Tindih Kewenangan, Kepentingan dan Regulasi dalam Pengelolaan Ruang Laut dengan Pemerintah Pusat	Penerapan ekonomi sirkular (blue/green economy)
Perikanan	Kesadaran masyarakat tentang manfaat makan ikan masih rendah				Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha	Peningkatan produksi perikanan
	Penguatan kemandirian pangan			Keterbatasan lahan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya perikanan	
Pertanian	Penguatan kemandirian pangan			Keterbatasan lahan di kota besar	Semakin berkurangnya lahan terbuka hijau akibat alih fungsi lahan	Pengembangan pertanian perkotaan

Peternakan	Kesehatan Hewan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	Penanganan Rabies	Jakarta Bebas Rabies	Vaksinasi Rabies	Kesehatan dan kesejahteraan hewan	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular zoonosis
------------	--	-------------------	----------------------	------------------	-----------------------------------	---

Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi:

1. Penjaminan keamanan pangan segar asal pertanian, hewan dan perikanan
2. Penguatan Ketahanan Pangan
3. Penerapan ekonomi sirkular (blue/green economy)
4. Peningkatan produksi perikanan
5. Pengembangan pertanian perkotaan
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular zoonosis

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Provinsi DKI Jakarta mencerminkan visi dan misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Cita-cita Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang termaktub dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, yaitu:

**“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang
Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh
Warganya”**

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan Misi Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera

Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan: (1) Meningkatkan Kualitas dan Kesempatan Pendidikan untuk Semua, (2) Memperbaiki Kualitas Kesehatan Masyarakat Perkotaan, (3) Mewujudkan Kontribusi dan Distribusi Manfaat Pembangunan Tanpa Kesenjangan Gender, dan (4) Menguatkan Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat.

Misi 2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata

Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Kompetitif dan Inovatif: (1) Menggerakkan Sektor Usaha Produktif dan Bernilai Tambah Tinggi dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan, dan (2) Menguatkan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Saing Kota.

Tercapainya Inklusivitas Sumber Daya Pembangunan dan Penghidupan yang Layak: (1) Meningkatkan Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja, dan (2) Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

Misi 3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal

Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern: (1) Memperbaiki Manajemen Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintah, (2) Mengembangkan Kapasitas dan Integritas Kerja Aparatur, (3) Mengakselerasi Transformasi Digital dan Layanan Kota Berbasis Teknologi, dan (4) Meningkatkan Kemudahan dan Kualitas Layanan Masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan

Terbangunnya Infrastruktur Kota Layak Huni: (1) Meningkatkan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan

Berkelanjutan, dan (2) Menyediakan Hunia Terjangkau dan Permukiman Layak.

Tercapainya Ekosistem Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim: (1) Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon, dan (2) Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Kota Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Misi 5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Terwujudnya Simpul Mobilitas dan Kegiatan Berusaha, Berkarya, dan Berwisata Berorientasi Transit: (1) Mengoptimalkan Layanan Transportasi Umum dan Sistem Mobilitas Terintegrasi, (2) Meningkatkan Performa Kawasan Strategis dan Kawasan Kompak Mandiri Berorientasi Transit, dan (3) Mewujudkan Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang menarik.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 dan ke-4 dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Rendah Karbon	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Ekosistem Laut Dan Pesisir Secara Keberlanjutan		Indeks Kesehatan Laut Di Wilayah Kewenangan Provinsi	67	69,69	70	70,5	71	71,5	71.5	
		Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Laut Dan Kawasan Pesisir	Persentase Luasan Kawasan Perairan Dan Pesisir Yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial Dalam Kondisi Sedang Dan Baik	36,58	36,6	36,61	36,62	36,63	36,64	36.64	
Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, Dan Bernilai Tambah Tinggi	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Ekonomi Maritim		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		2	2,5	3	3,5	4	4	
	Meningkatkan	Jumlah Produksi	142.3	224.3	228.3	232.3	236.4	240.6	1.162.1		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Produktivitas Industri Perikanan Dan Boga Bahari Yang Bertanggung Jawab	Perikanan	29	37	07	54	77	81	56	
		Meningkatnya Budidaya Dan Produksi Bahan Pangan Di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	27,5	28.99	31.49	33.99	36.49	38.99	38.99	
		Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan Yang Resilien Dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	27,5	28	30.5	33	35.5	38	38	
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	2.5	30	32.5	35	37.5	40	40	
Terjaminnya Pemenuhan	Meningkatnya Kualitas		Skor Pola Pangan Harapan	86,5	91.31	91.58	91.86	92.13	92.41	92.41	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kebutuhan Dasar Dan Perlindungan Sosial	Konsumsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Pangan Dengan Gizi Baik										
		Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, Dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence Of Undemourishment (PoU)	2.5	3.53	3.21	2.89	2.57	2.4	2.4	

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyusunan regulasi pelestarian pesisir & inventarisasi sumber daya pesisir	Pelaksanaan pemantauan dan penguatan kelembagaan pesisir	Pengembangan ekowisata dan restorasi kawasan pesisir	Evaluasi efektivitas perlindungan kawasan pesisir	Konsolidasi kebijakan pesisir berkelanjutan antar wilayah
Identifikasi potensi & pelatihan UMKM boga bahari	Penerapan sertifikasi keamanan pangan & produksi bersih	Penguatan branding dan pasar produk boga bahari	Ekspansi distribusi dan promosi nasional	Penajaman insentif industri boga bahari ramah lingkungan
Penetapan demplot pertanian perkotaan strategis	Pelatihan petani urban & bantuan sarpras urban farming	Pengembangan jejaring pasar hasil pertanian kota	Evaluasi produktivitas & ekspansi kawasan baru	Integrasi pertanian kota dalam RTRW wilayah padat

Konsolidasi cadangan pangan & gudang distribusi	Digitalisasi sistem distribusi pangan	Penguatan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Integrasi sistem logistik pangan lintas wilayah	Penjaminan ketahanan dan keterjangkauan pangan jangka panjang
---	---------------------------------------	---	---	---

Tabel 3.3 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Laut Dan Kawasan Pesisir	Peluang (Opportunity)		Ancaman (Threat)
	Dukungan regulasi nasional dan daerah terhadap konservasi laut dan pesisir		Pencemaran laut dan pesisir dari limbah rumah tangga dan industri
	Perhatian global terhadap restorasi ekosistem pesisir (blue carbon, SDGs, dll.)		Alih fungsi pesisir akibat reklamasi dan pembangunan tak terkendali
	Potensi pengembangan ekowisata bahari dan jasa lingkungan laut		Overfishing dan praktik penangkapan yang merusak habitat
			Degradasi ekosistem (mangrove, terumbu karang, padang lamun) akibat perubahan iklim
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O		Strategi S-T
Adanya kawasan konservasi pesisir dan laut (Kepulauan Seribu, dll.)	Mengembangkan program ekowisata berbasis konservasi di wilayah pesisir dengan dukungan masyarakat dan data ekosistem		Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi untuk mencegah pencemaran dan alih

		fungsi
Ketersediaan data spasial dan kajian baseline ekosistem pesisir	Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk rehabilitasi kawasan pesisir dengan dukungan lembaga riset	Menggunakan data baseline untuk memetakan risiko kerusakan akibat aktivitas pembangunan pesisir
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Terbatasnya anggaran dan personel untuk pengawasan kawasan pesisir	Mengadakan pelatihan teknologi konservasi dan monitoring berbasis kelompok masyarakat	Menyusun SOP terpadu lintas sektor untuk perlindungan pesisir dan laut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
Rendahnya kapasitas SDM lokal dalam teknologi konservasi	Mendorong integrasi zonasi pesisir ke dalam perencanaan tata ruang daerah dengan memanfaatkan dukungan regulasi	Mendorong kolaborasi multisektor (Pemprov DKI, Kementerian LHK, Kementerian KKP, akademisi) untuk mengatasi pencemaran dan reklamasi illegal
Lemahnya		Memprioritaskan

koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pesisir		kawasan pesisir rentan dalam perencanaan pembangunan agar tidak terdampak perubahan iklim secara langsung
Belum optimalnya integrasi antara RTRW dan zonasi pesisir		

Tabel 3.4 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatkan Produktivitas Industri Perikanan Dan Boga Bahari Yang Bertanggung Jawab	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Permintaan tinggi terhadap produk perikanan dan boga bahari di pasar domestik dan ekspor	Persaingan pasar dengan produk luar negeri yang lebih murah
	Dukungan program pemerintah dalam pengembangan UMKM perikanan dan hilirisasi hasil laut	Belum semua produk perikanan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
	Tersedianya teknologi pengolahan dan rantai dingin (cold chain) yang semakin terjangkau	Fluktuasi harga bahan baku (pakan, es, bahan pengawet) dan gangguan pasokan
	Peluang penguatan branding produk boga bahari lokal sebagai	Ketergantungan pada pasokan dari perairan yang terancam

	pangan sehat dan berkelanjutan	pencemaran dan overfishing
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya potensi sumber daya perikanan di perairan DKI dan Kepulauan Seribu	Mendorong hilirisasi produk boga bahari lokal dengan teknologi tepat guna dan pelatihan UMKM	Mengembangkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berbasis pelatihan dan sertifikasi lokal
Keberadaan pusat-pusat pengolahan hasil perikanan dan pelabuhan perikanan	Memanfaatkan branding lokal dan sertifikasi mutu untuk penetrasi pasar ekspor dan ritel domestik	Menyusun kebijakan harga dasar untuk melindungi produsen dari fluktuasi pasar
Dukungan regulasi daerah terhadap pengembangan industri boga bahari	Menjadikan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan inovasi produk perikanan daerah	Memanfaatkan komunitas lokal untuk pemantauan rantai pasok dan kondisi perairan produksi
Eksistensi kelompok masyarakat dan kelompok usaha bersama (KUB) yang aktif		
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T

Rendahnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan	Meningkatkan akses pembiayaan dan inkubasi usaha boga bahari melalui kemitraan publik-swasta	Menyusun roadmap penguatan industri boga bahari berbasis keberlanjutan dan keamanan pangan
Terbatasnya akses UMKM perikanan ke modal dan teknologi	Mendorong digitalisasi pemasaran produk laut lokal melalui platform e-commerce	Mendorong regulasi daerah tentang perlindungan UMKM terhadap dominasi produk impor
Masih minimnya infrastruktur rantai dingin dan logistik distribusi	Meningkatkan pelatihan SDM dan fasilitasi peralatan bagi UMKM industri perikanan	Membangun sinergi antara pelabuhan, pusat logistik, dan distributor untuk mencegah stagnasi distribusi
Belum meratanya edukasi kewirausahaan dan manajemen usaha perikanan		

Tabel 3.5 Perumusan Strategi Sasaran 3

Sasaran 3:	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan Yang	Dukungan kebijakan nasional terhadap pertanian perkotaan (urban farming) Ketersediaan teknologi	Alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan dan infrastruktur Pencemaran udara,

Resilien Dan Berkelanjutan	pertanian modern: hidroponik, vertikultur, smart farming	tanah, dan air di wilayah perkotaan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan lokal	Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah yang rawan terganggu
		Perubahan iklim yang mengganggu pola tanam dan produktivitas
	Dukungan pemerintah terhadap kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan peternakan	Risiko penyakit hewan menular, risiko zoonosis, populasi hewan tidak terkontrol
		Jumlah Juru Sembelih Halal tersertifikasi belum maksimal, higiene sanitasi pelaku usaha peternakan belum maksimal
		Terbatasnya zonasi tata ruang sektor peternakan
		Belum optimalnya pengelolaan limbah sektor peternakan
		Ketidaksesuaian

		peraturan perijinan berusaha kegiatan rumah potong
	Potensi kolaborasi dengan akademisi dan berbagai komunitas hewan kesayangan	Perbedaan prioritas dan kepentingan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan hygiene peternakan	Risiko masuknya penyakit hewan menular dari hewan potong yang berasal dari luar daerah, terutama menjelang Idul adha dan periode distribusi tinggi
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Tersedianya lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian urban	Mengembangkan kawasan pertanian kota terpadu berbasis komunitas dan teknologi modern	Mengintegrasikan zonasi pertanian perkotaan dalam RTRW dan RDTR untuk mencegah alih fungsi
Kelembagaan pertanian (kelompok tani kota) sudah terbentuk di beberapa wilayah	Memanfaatkan lahan aset pemerintah untuk demplot pertanian edukatif dan produktif	Menyusun sistem proteksi ekosistem lahan pertanian kota dari pencemaran dan tekanan iklim

Adanya inisiatif dan pilot project pertanian kota dari dinas dan mitra	Meningkatkan literasi pertanian melalui sekolah, media sosial, dll	Mengembangkan bank benih dan sistem distribusi hasil panen lokal untuk stabilisasi pasokan
Komitmen Pemprov DKI dalam pengembangan pangan lokal dan pertanian ramah lingkungan		
Pelaksanaan program vaksinasi hewan kesayangan dan pengendalian rabies yang cukup intensif	Penerapan target vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan	Perluasan informasi layanan vaksin dan kesehatan hewan kepada masyarakat
Jaringan klinik hewan, RPH, laboratorium veteriner cukup banyak	Peningkatan mutu uji, perluasan ruang lingkup uji	Peningkatan teknologi laboratorium, RPH
Pasar yang besar dan stabil	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan pengawasan HBKN
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Terbatasnya	Memberikan pelatihan	Menyusun kebijakan

SDM pertanian perkotaan yang terlatih dan konsisten	kewirausahaan dan teknologi urban farming kepada masyarakat	penyelenggaraan sistem pangan berkelanjutan
Minimnya pembiayaan dan akses peralatan pertanian modern untuk petani kota	Menjalin kemitraan dengan swasta untuk pembiayaan dan akses pasar hasil pertanian kota	Mengembangkan sistem pertanian rumah tangga untuk adaptasi perubahan iklim skala mikro
Kurangnya sistem pemasaran hasil pertanian urban	Mendorong peraturan daerah tentang insentif dan perlindungan kegiatan pertanian perkotaan	Membangun urban food network untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar
Tidak adanya regulasi khusus yang menjamin kelangsungan pertanian perkotaan		
Peningkatan populasi hewan peliharaan tidak sepenuhnya diikuti kesadaran pemilik terhadap kesehatan dan vaksinasi rutin	Meningkatkan edukasi kesehatan hewan, memperluas layanan vaksinasi dan pemeriksaan serta	Memperkuat regulasi dan pengawasan, akses kepemilikan hewan peliharaan rutin, meningkatkan kepatuhan pemilik
Kesadaran kesejahteraan	Penyediaan fasilitas publik	Penguatan regulasi terkait perdagangan

hewan belum optimal	shelter/penampungan yang layak, klinik hewan pemerintah, dan layanan steril hewan	hewan, transportasi dan standar pemeliharaan
Risiko Pencemaran dan bau di wilayah padat penduduk	Memperkuat pengelolaan limbah domestic, Peningkatan sarana sanitasi	Pengawasan terhadap usaha kecil/rumahan, kolaborasi dengan komunitas lingkungan

Tabel 3.6 Perumusan Strategi Sasaran 4

Sasaran 4: Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, Dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Dukungan program nasional seperti Food Estate, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Digital Food System	Ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar DKI Jakarta
	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat, aman, dan lokal	Kerentanan distribusi pangan terhadap kemacetan, banjir, dan bencana
	Potensi sinergi lintas sektor (perdagangan, perhubungan, pertanian) untuk sistem logistik pangan	Fluktuasi harga pangan akibat gangguan pasok global dan cuaca ekstrem
	Perkembangan teknologi logistik dan pelacakan rantai	Tidak tercapainya pola konsumsi masyarakat sesuai kaidah pangan

	pasok (e-logistics, cold chain)	Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
		Ancaman keamanan pangan dari produk yang tidak memenuhi standar higienitas dan kemasan
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya BUMD pangan yang menangani penyediaan, distribusi dan cadangan pangan	Memperluas fungsi BUMD pangan untuk mengelola rantai pasok digital dan distribusi berbasis teknologi	Mengintegrasikan sistem distribusi pangan dengan sistem informasi kebencanaan dan logistik perkotaan
Infrastruktur distribusi dan gudang pangan yang mulai tersebar di wilayah kota	Mengembangkan sosialisasi pemanfaatan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kolaborasi dengan kelompok masyarakat dan pelaku usaha	Meningkatkan sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan di seluruh jalur distribusi
Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD pangan yang sudah memiliki jejaring	Meningkatkan kerja sama antardaerah dan antar-BUMD dalam menjaga pasokan dan harga pangan	Menyiapkan perhitungan cadangan pangan di tiap wilayah kota untuk merespons gangguan pasokan

dengan daerah pemasok pangan		
Komitmen pemerintah daerah terhadap penyediaan, pemanfaatan pangan dan pengawasan mutu serta keamanan pangan		Meningkatkan intensitas penyebaran informasi pola pangan B2SA secara langsung maupun melalui media sosial kepada masyarakat
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Masih terbatasnya gudang dan cadangan pangan di wilayah kota	Mengembangkan gerai dan gudang pangan di kecamatan/kelurahan berbasis kolaborasi publik-swasta	Mendorong percepatan pembangunan gudang pangan di dalam kota sebagai cadangan operasional
Kurangnya SDM pengawas pangan yang tersertifikasi dan terlatih	Memberikan pelatihan kepada enumerator, pengawas pangan dan edukator pola konsumsi pangan dengan dukungan K/L terkait	Meningkatkan sinergi dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas UMKM dan BPPOOM untuk kontrol keamanan pangan
Minimnya edukasi publik tentang pola konsumsi	Mengimplementasikan SNI Pasar Rakyat dan Pasar Sehat serta melakukan	Menyusun kebijakan insentif bagi pelaku distribusi pangan yang patuh pada standar

pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	pengawasan mutu dan keamanan pangan	keamanan
Belum meratanya akses pangan bagi masyarakat rentan rawan pangan	Meningkatkan akses pangan masyarakat rentan rawan pangan dalam bentuk pemberian subsidi pangan	

Tabel 3.7 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Penguatan kawasan konservasi laut berbasis masyarakat	Mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir secara lestari melalui sinergi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi komunitas lokal
		Pemanfaatan teknologi monitoring dan pemetaan	
		Edukasi publik berbasis ekowisata	
2	Meningkatkan Produktivitas Industri Perikanan Dan Boga Bahari Yang Bertanggung Jawab	Penguatan kapasitas UMKM boga bahari dan pengolah hasil laut	Meningkatkan daya saing industri perikanan dan boga bahari melalui dukungan teknologi, pelatihan, dan perlindungan mutu produk
		Sertifikasi dan pelatihan keamanan pangan	
		Penguatan Promosi & Digitalisasi	

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		pemasaran produk perikanan	
3	Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan Yang Resilien dan Berkelanjutan	Pemanfaatan lahan aset daerah untuk pertanian urban Pelatihan urban farming berbasis teknologi Pemberdayaan kelompok tani kota	Memperkuat sistem pertanian perkotaan dengan pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta keterbatasan lahan
4	Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Peningkatan cadangan dan distribusi pangan perkotaan Penguatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Sinergi antar daerah dalam logistik pangan	Menyusun kebijakan untuk membangun sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh melalui penyediaan pangan, distribusi pangan berbasis teknologi, pemanfaatan pangan, pengawasan terpadu, dan kolaborasi antar lembaga
5	Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Mempertahankan DKI Jakarta bebas rabies Penurunan kasus penyakit hewan menular Pelatihan penerapan persyaratan teknis	Penyediaan regulasi/kebijakan untuk penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
		kesehatan masyarakat veteriner Peningkatan sertifikasi nomor kontrol veteriner Peningkatan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Pembinaan kelompok usaha peternakan	

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan

keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3.8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	UU 23/14: Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian	Transformasi Jakarta menjadi pusat unggulan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir secara lestari melalui sinergi kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi komunitas lokal	Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir	
2.		Eskalasi Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia yang terintegrasi secara global	Meningkatkan daya saing industri perikanan dan boga bahari melalui dukungan teknologi, pelatihan, dan perlindungan mutu produk	Industri perikanan dan boga bahari	
3.		Pengarusutamaan R&D dan inovasi dalam pembangunan	Memperkuat sistem pertanian perkotaan dengan pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta keterbatasan lahan	Pertanian perkotaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.		Akselerasi Jakarta sebagai hub pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya	Membangun sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh melalui penyediaan pangan, distribusi berbasis teknologi, pemanfaatan pangan, pengawasan terpadu, dan kolaborasi antarlembaga	Ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan pemanfaatan pangan	
5.		Transformasi infrastruktur kota menuju ketahanan dan keberlanjutan lingkungan			
6.		Penguatan konektivitas informasi, barang, dan penumpang Jakarta sebagai pusat transit Regional dan Global			
7.		Reformasi tata Kelola menuju kota global yang berdaya saing			
8.		Menuju Jakarta Kota Global yang ramah satwa	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap aspek kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kesejahteraan hewan		

Berdasarkan Tabel 3.8 tentang Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD, poin ke-4 arah kebijakan Renstra PD adalah Ketahanan Pangan, yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan pemanfaatan pangan. Sebagai bagian dari arah kebijakan renstra PD, fokus pada aspek ketahanan pangan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian sistem pangan dapat berjalan secara terpadu. Dengan memperhatikan ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan, kebijakan yang disusun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pangan serta mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera dan berdaya.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan pangan yang secara nasional memiliki definisi sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Pada tingkat Pemerintah Daerah, ketersediaan pangan dapat tercukupi melalui produksi pangan secara mandiri/domestik, perdagangan pangan dan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data BPS, luas panen padi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 seluas 513,27 hektare, mengalami penurunan 29,66 hektare (5,46 persen) dibandingkan tahun 2023. Luas lahan yang terus menurun berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar pemenuhan pangan di DKI Jakarta terpenuhi melalui perdagangan pangan baik yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD maupun yang dilakukan oleh pihak swasta.

BUMD Provinsi DKI Jakarta melakukan perdagangan pangan secara Business to Business (B to B) dengan berbagai pihak penyedia pangan. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan BUMD berupa contract farming. Contract farming adalah suatu kerjasama antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga serta produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk. Dengan adanya kerjasama perdagangan pangan berupa contract farming, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan kepastikan pasokan/ketersediaan pangan sementara penyedia pangan (petani/peternak) mendapatkan kepastian pasar serta harga.

Inflasi harga pangan memiliki hubungan langsung dengan ketahanan pangan karena kenaikan harga dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terutama Idul Fitri memberikan pengaruh terhadap kenaikan permintaan pasar oleh masyarakat terhadap pangan. Sesuai dengan hukum supply dan demand, kenaikan permintaan di tingkat konsumen dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang apabila berlangsung secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian suatu daerah.

Menjelang dan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri bahan pangan yang cenderung mengalami peningkatan harga adalah beras, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, ayam, aneka cabai merah, bawang merah, gula pasir dan minyak goreng.

Dari hukum pasar tersebut dapat dikatakan bahwa kunci utama dalam mengendalikan inflasi pangan terutama saat HBKN Idul Fitri dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.

3.4 Penyusunan Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Pohon Kinerja merupakan tahapan penting dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (KPKP). Pohon Kinerja menggambarkan hubungan logis antara tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, serta hasil yang diharapkan (outcome) dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian di Provinsi DKI Jakarta.

Pohon Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, isu strategis sektoral, dan permasalahan aktual yang dihadapi daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh upaya Dinas KPKP dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Pohon Kinerja dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, dimulai dari penetapan tujuan pembangunan daerah, kemudian diturunkan menjadi tujuan perangkat daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Setiap tingkatan sasaran memiliki keterkaitan yang erat, sehingga membentuk hubungan sebab-akibat (causal linkage) antara input, output, dan outcome yang dihasilkan.

Dalam proses penyusunan Pohon Kinerja ini, Dinas KPKP mengidentifikasi isu strategis utama yang menjadi fokus

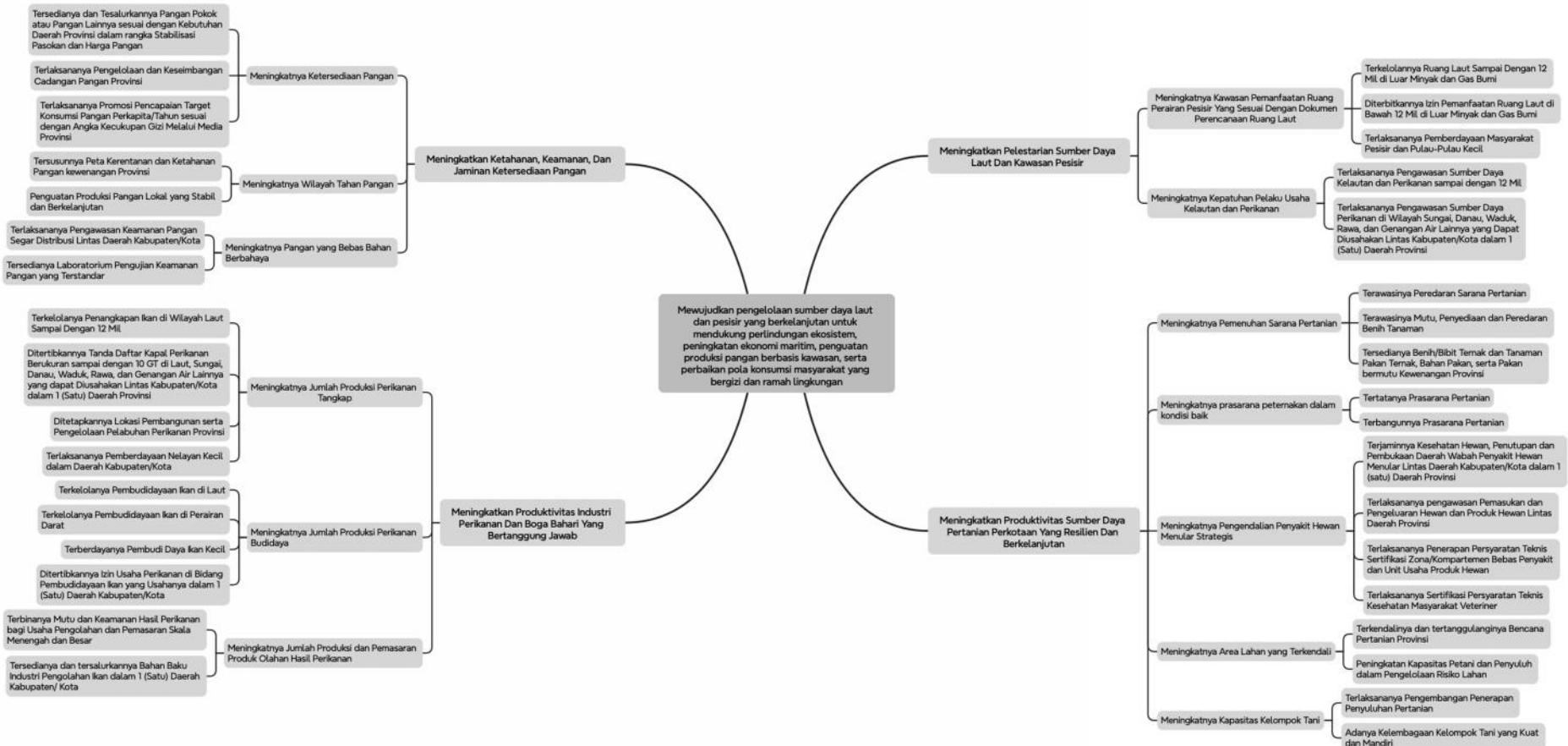
pembangunan sektor pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Penjaminan keamanan pangan segar asal pertanian, hewan, dan perikanan;
2. Penguatan ketahanan pangan;
3. Penerapan ekonomi sirkular (blue/green economy);
4. Peningkatan produksi perikanan;
5. Pengembangan pertanian perkotaan; dan
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular zoonosis.

Berdasarkan isu strategis tersebut, disusunlah pohon kinerja yang memuat tujuan perangkat daerah, sasaran strategis, serta program dan kegiatan prioritas yang diharapkan mampu menjawab permasalahan utama sekaligus mewujudkan hasil pembangunan yang diinginkan. Pohon Kinerja ini menjadi acuan utama dalam perumusan strategi, kebijakan, dan pengukuran kinerja Dinas KPKP selama periode 2025–2029.

Dengan adanya Pohon Kinerja ini, arah pembangunan sektor ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian di Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan hewan, serta keberlanjutan lingkungan.

Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Ekosistem Laut Dan Pesisir Secara Keberlanjutannya				Indeks Kesehatan Laut Di Wilayah Kewenangan Provinsi		
		Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Laut Dan Kawasan Pesisir			Persentase Luasan Kawasan Perairan Dan Pesisir Yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial Dalam Kondisi Sedang Dan Baik		
			Meningkatnya Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir Yang Sesuai Dengan Dengan		Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Dokumen Perencanaan Ruang Laut					
				Terkelolannya Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas Perairan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Dikelola Melalui Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
				Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
				Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Rekomendasi Izin yang Dikeluarkan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
				Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Masyarakat yang Berdaya	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkat Kapasitasnya	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguanan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguanan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
				Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
				Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
				Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	
				Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Ekonomi Maritim				Pertumbuhan Pdrb Sub Sektor Perikanan		
		Meningkatkan Produktivitas Industri			Jumlah Produksi Perikanan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perikanan Dan Boga Bahari Yang Bertanggung Jawab					
			Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina dan Difasilitasi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Ditertibkannya Tanda Daftar	Persentase kapal perikanan yang	Penerbitan Tanda Daftar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	terdaftar di provinsi DKI Jakarta	Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Perikanan Berukuran	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	
				Ditetapkannya Lokasi Pembangunan serta	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan	Penetapan Lokasi Pembangunan serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Dikelola	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Terkelolanya	Persentase	Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembudidaya Ikan di Laut yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta	Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Terjaminnya ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Persentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP Provinsi DKI Jakarta	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
				Tersedianya Sarana	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditertibkannya Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan skala kecil dan menengah yang dibina untuk memperoleh izin usaha budidaya ikan di Darat dan Laut	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu)	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Terberdayanya Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan baik perorangan, kelompok maupun komunitas yang	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					diberikan pembinaan, pelatihan, informasi dan teknologi sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi SDM dan produktivitas usahanya		
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan		Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
				Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Fasilitasi,	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
				Tersedianya dan tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah Masyarakat yang diberikan Manfaat Program Gemarikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kota		Kota	
				Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Budidaya Dan Produksi Bahan Pangan Di Kawasan Perkotaan				Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		
		Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan Yang Resilien			Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			(4)	(5)			
		Dan Berkelanjutann					
			Meningkatnya Pemenuhan Sarana Pertanian		Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian	Persentase kepatuhan pelaku usaha pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Peredaran Sarana Pertanian	Pertanian	Pertanian	
				Terawasinya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih yang Bermutu, Bersertifikat di DKI Jakarta	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Terawasinya mutu, penyediaan dan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Tanaman Hortikultura	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan bermutu Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit/benih yang disediakan/didistribusikan dengan baik	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Bimbingan Peningkatan	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi	Pemberian Bimbingan Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya prasarana peternakan dalam kondisi baik		Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Tertatanya Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	Penataan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terseleenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kesmavet	Kesmavet	
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya, terehabilitasi, dan terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	
				Terbangunnya Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Lokasi Prasarana	Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pertanian yang Ditata		
				Terbangunnya, terehabilitasi, dan terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terbangunnya, terehabilitasi, Terpelihara, dan beroperasinya Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis		Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terjaminnya Kesehatan	Jumlah hewan yang diberikan pelayanan	Penjaminan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kesehatan hewan	Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
				Terlaksananya pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang Taat Aturan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	
				Terlaksananya	Jumlah kegiatan	Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengawasan Peredaran Produk Hewan	pengawasan peredaran produk hewan	Peredaran Produk Hewan	
				Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase unit usaha produk hewan yang menerapkan persyaratan teknis sertifikasi	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	
				Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan	Peningkatan kesadaran masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kesadaran masyarakat	peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	
				Terlaksananya Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Tersertifikasi	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Area Lahan yang Terkendali		Persentase Area Lahan yang Terkendali	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terkendalinya dan tertanggulanginya a Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani		Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Program Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina dan difasilitasi	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Termafaatkananya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasi oleh Penyuluhan Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Pangan					Skor Pola Pangan Harapan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dengan Gizi Baik						
		Meningkatkan Ketahanan, Keamanan, Dan Jaminan Ketersediaan Pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence Of Undemourishment (Pou)		
			Meningkatnya Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Umum yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya	Jumlah Paket	Penyediaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Elektronik pada SKPD		SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Lainnya	yang Disediakan	Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya	Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dibayarkan Perizinannya	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya	Jumlah Sarana dan	Pemeliharaan/Re	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pelayanan BLUD yang baik	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Persentase Ketersediaan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Tersedianya dan	Persentase Paket	Penyediaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan yang Terdistribusi	Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Terlaksananya	Jumlah koordinasi	Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Promosi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		n sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
			Meningkatnya Wilayah Tahan Pangan		Persentase Wilayah Tahan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Tersusunnya	Jumlah Kecamatan	Penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	yang Tahan Pangan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya		Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Bahan Pangan yang Diuji	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
				Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu	Penyediaan sarana dan prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	pangan segar asal tumbuhan	pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Bidang Urusan/Program /Outcom e/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Bas eline 202 4	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	18.5	18.52	16,202,740,909	18.6	6,452,908,676	18.7	8,600,000,000	18.8	6,970,000,000	18.9	7,640,000,000	19	9,310,000,000	19	38,972,908,676		
Pengelolaan Ruang Laut	Luas Perairan Ekosistem Laut dan	Ha	272,3	283,3	5,072,908,676	205	5.072.908.676	210	5.300.000.000	215	5.500.000.000	220	5.750.000.000	225	5.950.000.000	225	27.572.908.676		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pesisir yang Dikelola Melalui Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi																		
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdasar	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	200	100	500.000 ,000	200	472.908 .676	200	500.000 .000	200	500.000 .000	200	550.000 .000	233	550.000 .000	233	2.572.9 08.676		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
kan Penetapan dari Pemerintah Pusat																			
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	255,3	186,54	10,954,501,349	269,3	4.600.000.000	283,3	4.800.000.000	298,3	5.000.000.000	313,3	5.200.000.000	329,3	5.400.000.000	329,3	25.000.000.000		
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah	Persentase Rekomendasi Izin yang Dikeluarkan	Persen	70	72	300,000,000	75	50.000.000	77	100.000.000	79	100.000.000	81	100.000.000	83	100.000.000	83	450.000.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi																			
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	3	50.000.000	4	50,000,000	5	100,000,000	6	100,000,000	7	100,000,000	8	100,000,000	33	450,000,000		
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Persentase Masyarakat yang	Persen	70	70	4,348,239,560	86.35	1,330,00,000	86.45	3,200,00,000	86.55	1,370,00,000	86.65	1,790,00,000	86.75	3,260,00,000	86.75	10,950,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
dan Pulau-Pulau Kecil	Berdaya																		
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	140	100	1,150,00,000	160	1.150.00.000	560	3.000.00.000	160	1.150.00.000	160	1.550.00.000	560	3.000.00.000	1740	9.850.00.000		
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan	Kelompok	8	19	1,098,239,560	8	180,000,000	8	200,000,000	8	220,000,000	8	240,000,000	8	260,000,000	8	1,100,00,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
at Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	0	72	2,000,000,000	72	1.324.012.154	73	1.775.000.000	74	1.385.000.000	75	1.565.500.000	76	1.415.000.000	76	7.464.512.154		
Pengawasan Sumber	Persentase Kepatuhan	Persen	55,39	60	1,750,000,000	60	1,129,678,469	61	1,565,000,000	62	1,160,000,000	63	1,327,500,000	64	1,165,000,000	64	6,347,178,469		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil																	
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang	17			12	223,126 ,000	3	620,000 ,000	6	130,000 ,000	12	260,000 ,000	3	70,000, 000	3	1,303,1 26,000	

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	48	48		48	761,552 ,469	48	790,000 ,000	48	850,000 ,000	48	860,000 ,000	48	850,000 ,000	240	4,111,5 52,469		
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan	Pelaku Usaha	0			1	10,000, 000	2	10,000, 000	2	10,000, 000	3	15,000, 000	3	15,000, 000	11	60,000, 000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
provinsi	an provinsi																		
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha				2	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	10	7,500,000	10	10,000,000	32	32,500,000		
Pengawasan usaha	Jumlah Pelaku usaha	Pelaku Usaha	0			1	10,000,000	2	10,000,000	3	15,000,000	4	15,000,000	5	20,000,000	15	70,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	a																	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMA)	Jumlah POKMAS WAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	15	15	250,000 ,000	15	120,000 ,000	15	130,000 ,000	15	150,000 ,000	15	170,000 ,000	15	200,000 ,000	15	770,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SWAS)																			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolahkan Lintas Kabupaten	Persen	90	75	250,000 ,000	91	194,333 ,685	92	210,000 ,000	93	225,000 ,000	94	238,000 ,000	95	250,000 ,000	95	1,117,33,685		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
n/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan	Pelaku Usaha	100	100	186,333 ,685	100	200,000 ,000	100	210,000 ,000	100	220,000 ,000	100	230,000 ,000	100	1,046,33,685				

Bidang Urusan/Program /Outcom e/Kegiat an/Subk egiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Bas elin e 202 4	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
provinsi	kewenang an provinsi																		
Pengawa san Usaha Pembudi dayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genanga n air lainnya sesuai kewenang an provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudid ayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhan nya sesuai kewenang an provinsi	Pelak u Usah a	0	4	8,000,0 00	5	10,000, 000	6	15,000, 000	7	18,000, 000	8	20,000, 000	8	71,000, 000				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190 671	122 509	108,281 ,455,73 5	194 484	13,275, 000,000	198 374	11,460, 000,000	202 341	13,445, 000,000	206 388	14,080, 000,000	210 516	12,215, 000,000	210 516	64,475, 000,000		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina dan Difasilitasi	Persen	100	100	5,766,8 85,215	100	2,100,0 00,000	100	2,150,0 00,000	100	2,200,0 00,000	100	2,250,0 00,000	100	2,300,0 00,000	100	11,000, 000,000		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	0			1	1.000.0 00.000	1	500.000 .000	1	500.000 .000	1	500.000 .000	1	500.000 .000	5	3.000.0 00.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
n Tangkap	yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2741			1550		1.100.000.000	1600	1.650.000.000	1650	1.700.000.000	1700	1.750.000.000	1750	1.800.000.000	1750	8.000.000.000	
Penerbita	Persentas	Pers	100		100	225,000	100	235,000	100	245,000	100	255,000	100	265,000	100	1,225,000			

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
n Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	e kapal perikanan yang terdaftar di provinsi DKI Jakarta	en					,000		,000		,000		,000		,000	00,000			

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
an Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																			
Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	100			110	225,000 ,000	120	235,000 ,000	130	245,000 ,000	140	255,000 ,000	150	265,000 ,000	150	1,225,00,000		
Penetapan Lokasi Pembangunan	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan	Persen	100	100	102,223 ,000,000	100	10,500, 000,000	100	8,600,0 00,000	100	10,500, 000,000	100	11,050, 000,000	100	9,100,0 00,000	100	49,750, 000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	yang Dibangun dan Dikelola																		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	21	18	77,001,000,000	4	10,500,000,000	3	8,600,000,000	2	10,500,000,000	2	11,050,000,000	2	9,100,000,000	21	49,750,000,000		
Pemberdayaan Nelayan	Persentase nelayan kecil yang	Persen	100			100	450,000,000	100	475,000,000	100	500,000,000	100	525,000,000	100	550,000,000	100	2,500,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkat kapasitasnya																		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	200			200	450,000 ,000	200	475,000 ,000	200	500,000 ,000	200	525,000 ,000	200	550,000 ,000	120	2,500,00,000		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	521 0.75	454 3	12,555,384,661	521 0,75	9.887.5 00.000	531 4,96	10.257.500.000	542 1,26	10.980.000.000	552 9,69	11.222.500.000	564 0,28	12.077.500.000	564 0,28	54.425.000.000		
Pengelolaan Pembudidayaan	Persentase Pembudidaya Ikan di	Persen	100	100	5,607,8 06,004	100	4,440,0 00,000	100	4,650,0 00,000	100	4,860,0 00,000	100	5,020,0 00,000	100	5,180,0 00,000	100	24,150,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Ikan di Laut	Laut yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari DKPKP DKI Jakarta																		
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	9	569,875 ,452	5	1,850,0 00,000	5	1,950,0 00,000	5	2,050,0 00,000	5	2,100,0 00,000	5	2,150,0 00,000	34	10,100, 000,000		
Penjaminan Ketersediaan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Unit	66	58	4,245,9 30,552	70	1,900,0 00,000	70	1,950,0 00,000	70	2,000,0 00,000	70	2,050,0 00,000	70	2,100,0 00,000	70	10,000, 000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	di Laut																		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah	Jumlah Pembudidaya	Orang	50	72	490,000 ,000	55	430,000 ,000	55	460,000 ,000	60	490,000 ,000	60	520,000 ,000	65	550,000 ,000	345	2,450,0 00,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Daerah Provinsi																			
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	0			10	130,000 ,000	12	145,000 ,000	15	160,000 ,000	17	175,000 ,000	20	190,000 ,000	74	800,000 ,000		
Monitoring Kesehatan Ikan dan	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring	Dokumen	4			4	130,000 ,000	4	145,000 ,000	4	160,000 ,000	4	175,000 ,000	4	190,000 ,000	24	800,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Percentase Pembudidaya Ikan Di Darat yang Memanfaatkan Fasilitas Benih Ikan dari	Persen	100	100	4,034,665,030	100	3,450,00,000	100	3,550,00,000	100	3,600,00,000	100	3,640,00,000	100	3,850,00,000	100	18,090,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	DKPKP Provinsi DKI Jakarta																		
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	466				519	2,650,000,000	526	2,700,000,000	536	2,800,000,000	556	2,940,000,000	561	3,150,000,000	3164	14,240,000,000	
Penyediaan Prasarana	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Unit	0			7	800.000 .000	7	850.000 .000	7	800.000 .000	7	700.000 .000	7	700.000 .000	35	3.850.000.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pembudi dayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudi dayaan Ikan yang Usahanya dalam	Jumlah pembudidaya ikan skala kecil dan menengah yang dibina untuk memperoleh izin	Rekomendasi	0			60	55,000,000	60	57,500,000	60	60,000,000	60	62,500,000	60	65,000,000	300	300,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	usaha budidaya ikan di Darat dan Laut																		
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak	Rekomendasi	0	60	55,000,000	60	57,500,000	60	60,000,000	60	62,500,000	60	65,000,000	300	300,000,000				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga	Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga																		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kerja Asing yang Diterbitkan																		
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan baik perorangan, kelompok maupun komunitas yang diberikan pembinaan, pelatihan, informasi dan teknologi	Orang	0			120	1,942,500,000	120	2,000,000,000	120	2,460,000,000	120	2,500,000,000	120	2,982,500,000	600	11,885,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi SDM dan produktivitas usahanya																		
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan	Kelompok	0	15	192,500 ,000	0	0	15	210,000 ,000	0	0	15	232,500 ,000	45	635,000 ,000				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
gaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kelembagaan																		
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelegaraan Pendidikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Kelompok	50	55	1,750,000,000	55	2,000,000,000	55	2,250,000,000	55	2,500,000,000	55	2,750,000,000	325	11,250,000,000				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
an dan Pelatihan	Penyeleng garaan Pendidika n dan Pelatihan																		
Program Pengolah an Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	248 39	157 91.7 9	17,065, 122,498	248 70	7,750,0 00,000	249 00	7,850,0 00,000	249 30	7,950,0 00,000	249 55	7,950,0 00,000	249 80	8,250,0 00,000	249 80	39,750, 000,000		
	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	23,6 7	47.2		23.7 4		23.8 9		23.9 7		24.1		24.2 5		24.2 5			
Pembina an Mutu dan Keamana	Persentase Unit Usaha Pengolaha	Persen	100	100	8,815,1 22,498	100	5,500,0 00,000	100	5,550,0 00,000	100	5,600,0 00,000	100	5,700,0 00,000	100	5,750,0 00,000	100	28,100, 000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Penyelenggaraan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penyelenggaraan Ikan yang sesuai Dengan Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan																		
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan	Kegiatan	10			10	5,500,00,000	10	5,550,00,000	10	5,600,00,000	10	5,700,00,000	10	5,750,00,000	50	28,100,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk Ikan yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan	Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan																		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
si atau digunakan, dan Berdaya Saing	Berdaya Saing																		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat yang diberikan Manfaat Program Gemarikan	Orang	153 00	200 0	8,250,0 00,000	164 00	2,250,0 00,000	168 50	2,300,0 00,000	170 00	2,350,0 00,000	170 50	2,250,0 00,000	174 00	2,500,0 00,000	174 00	11,650, 000,000		
Peningkatan Ketersedian	Jumlah Peningkatan	Ton	16,2 31	5,250,0 00,000	9.1	2,250,0 00,000	9.2	2,300,0 00,000	9.3	2,350,0 00,000	9.4	2,250,0 00,000	9.5	2,500,0 00,000	62,7	11,650, 000,000			

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
aan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	76	50	6,325,000,000	76	9,434,862,423	77	11,340,071,654	78	12,471,853,072	79	13,704,203,656	80	15,048,172,561	80	61,999,163,366		
Pengawasan Peredara	Persentase kepatuhan	Persen	50	100	150,000,000	55	75,000,000	60	75,000,000	65	75,000,000	70	75,000,000	80	75,000,000	80	375,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
pen Sarana Pertanian	pelaku usaha pertanian																		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	5	150,000 ,000	2	50,000, 000	2	50,000, 000	2	50,000, 000	2	50,000, 000	2	50,000, 000	2	250,000 ,000		
Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen	0			4	25,000, 000	4	25,000, 000	4	25,000, 000	4	25,000, 000	4	25,000, 000	4	125,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	si Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih yang Bermutu, Bersertifikat di DKI Jakarta	Persen	85	85	5,750,000,000	85.5	9,209,862,423	86	11,090,071,654	86.5	12,196,853,072	87	13,414,203,656	87.5	14,753,172,561	87.5	60,664,163,366		
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk	Batang	100	00		110	8.943.292	125	10.821.384.202	150	11.903.522.622	175	13.093.874.885	200	14.403.262.373	860	59.165.336.811		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Berbentuk Batang	Batang yang diperbaikakan																		
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbaikakan	Ton	44			45	224.214 .526	46	224.214 .526	47	246.635 .978	48	271.299 .576	49	298.429 .533	279	1.264.794.139		
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura yang	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang	Laporan	12			4	42,355, 168	4	44,472, 926	4	46,694, 472	4	49,029, 195	4	51,480, 655	4	234,032 ,416		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
ra	terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga																		
Peningkatan	Jumlah bibit/benih	Bibit/Benih	0			100	150,000 ,000	100	175,000 ,000	100	200,000 ,000	100	215,000 ,000	100	220,000 ,000	500	960,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	yang disediakan/didistribusikan dengan baik																		
Pemberian Bimbingan Peningkatan Peningkatan Produksi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi	Dokumen	0			1	150,000 ,000	1	175,000 ,000	1	200,000 ,000	1	215,000 ,000	1	220,000 ,000	5	960,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
tan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenang an Provinsi	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenang an Provinsi																		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi	Persen	58	60	117,521 ,279,85 5	60	17,123, 795,501	65	15,504, 143,955	70	15,909, 926,185	75	13,349, 727,125	80	11,883, 322,635	80	73,770, 915,401		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
a Pertanian	baik																		
	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	Persen	100	75		100		100		100		100		100		100			
Penataan Prasaran a Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	Loka si	150			160	14,157, 579,501	170	12,341, 306,355	180	12,530, 804,825	190	9,732,6 93,629	200	8,004,5 85,789	200	56,766, 970,099		
Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan	Unit	1			1	1,000,0 00,000	1	1,000,0 00,000	1	1,000,0 00,000	1	1,000,0 00,000	1	1,000,0 00,000	1	5,000,0 00,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Laboratorium Keswan dan Kesmavet	garakan Laboratorium Keswan dan Kesmavet																		
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	6			7	11,157,579,501	7	9,341,306,355	7	9,530,804,825	7	6,732,693,629	7	5,004,585,789	41	41,766,970,099		
Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan,	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Unit	0			1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	5	10,000,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan																		
Pembangunan Prasarana	Persentase Peningkatan	Persen	49	15	1,200,000,000	50	2,966,216,000	50	3,162,837,600	50	3,379,121,360	50	3,617,033,496	50	3,878,736,846	50	17,003,945,302		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
a Pertanian	an Jumlah Lokasi Prasarana Pertanian yang Ditata																		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	4	1,200,000,000	2	1,966,216,000	2	2,162,837,600	2	2,379,121,360	2	2,617,033,496	2	2,878,736,846	10	12,003,945,302		
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan rumah potong hewan yang	Jumlah rumah potong hewan yang	Unit	0			1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	5	5,000,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcom e/Kegiat an/Subk egiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satu an	Bas elin e 202 4	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
raan dan operasio nalisasi Rumah Potong Hewan	dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi																		
Program Pengend alian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentas e Pengendal ian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Pers en	100	100	6,403,2 75,681	100	2,350,0 00,000	100	2,350,0 00,000	100	2,350,0 00,000	100	2,350,0 00,000	100	2,350,0 00,000	100	11,750, 000,000		
	Persentas e Pengendal ian	Pers en	82,4 3	70		89		89,5		89,8		90		90,5		90,5			

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	12,5	5		13		14		15		16		17		17			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	Jumlah hewan yang diberikan pelayanan kesehatan hewan	Ekor	653 00	620 00	3,946,419,600	666 06	1.700.000.000	679 38	1.700.000.000	692 97	1.700.000.000	706 83	1.700.000.000	720 96	1.700.000.000	720 96	8.500.000.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	0	15	1.700.000.000	15	1.700.000.000	15	1.700.000.000	15	1.700.000.000	15	1.700.000.000	75	8,500,00,000				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Menular																			
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang Taat Aturan	Persen	88,8	75	85,000,000	89	100,000,000	89,25	100,000,000	89,5	100,000,000	89,75	100,000,000	90	100,000,000	90	500,000,000		
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	0			4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	250,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	6			6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	250,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Lainnya (HPM)																			
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase unit usaha produksi hewan yang menerapkan persyaratan teknis sertifikasi	Persen	84			86	200,000 ,000	87	200,000 ,000	87	200,000 ,000	88	200,000 ,000	88	200,000 ,000	87.2	1,000,00,000		
Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang	Laporan	1			1	50,000, 000	1	50,000, 000	1	50,000, 000	1	50,000, 000	1	50,000, 000	6	250,000 ,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner																		
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1			1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	6	250,000,000		
Pembinaan	Jumlah unit usaha	Unit Usah	50			120	50,000,000	140	50,000,000	160	50,000,000	180	50,000,000	200	50,000,000	850	250,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	a																	
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat	Orang	800			1000	50,000,000	1000	50,000,000	1100	50,000,000	1200	50,000,000	1300	50,000,000	6400	250,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
veteriner dan Kesejahteraan Hewan	tit veteriner dan kesejahteraan hewan																		
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Tersertifikasi	Persen	86	86	1,229,300,000	89	50,000,000	90	50,000,000	90	50,000,000	91	50,000,000	91	50,000,000	91	250,000,000		
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner	Orang	50			70	50,000,000	70	50,000,000	70	50,000,000	70	50,000,000	70	50,000,000	400	250,000,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi																		
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	64			65	300.000 .000	70	300.000 .000	75	300.000 .000	80	300.000 .000	88	300.000 .000	88	1.500.00.000		
Pengawas	Jumlah	Lapor	6			6	300.000	6	300.000	6	300.000	6	300.000	6	300.000	6	1.500.0		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
san Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	an					.000		.000		.000		.000		.000	00.000			
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Area Lahan yang Terkendali	Persen	87	85	400,000 ,000	88	1,040,2 48,809	89	1,144,2 73,690	90	1,258,7 01,059	91	1,384,5 71,165	92	1,523,0 28,281	92	6,350,8 23,004		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Serangan OPT yang dapat dikendalikan	Persen	0	85	400,000 ,000	100	1,040,2 48,809	100	1,144,2 73,690	100	1,258,7 01,059	100	1,384,5 71,165	100	1,523,0 28,281	100	6,350,8 23,004		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	55	50	400,000 ,000	55	1,040,2 48,809	55	1,144,2 73,690	55	1,258,7 01,059	60	1,384,5 71,165	60	1,523,0 28,281	60	6,350,8 23,004		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas	Persen	0	2.5	6,765,0 68,591	10	7,879,2 62,250	20	8,715,5 52,604	30	8,289,4 34,506	40	10,717, 285,796	50	11,927, 137,184	50	47,528, 672,340		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kelompok Tani																		
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina dan difasilitasi	Persen	0			20	7,879,262,250	40	8,715,552,604	60	8,289,434,506	80	10,717,285,796	100	11,927,137,184	100	47,528,672,340		
Diseminasikan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	7	7	2,849,570,409	7	6,023,941,136	7	6,719,763,568	7	6,151,980,592	7	8,423,199,588	7	9,465,511,108	42	36,784,395,992		
Pelaksanaan Penyuluhan	Jumlah Kelompok Petani	Kelompok	50	47	2,077,998,182	50	1,855,321,114	50	1,995,789,036	50	2,137,453,914	50	2,294,086,208	50	2,461,626,076	300	10,744,276,348		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
an dan Pemberdayaan Petani	yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	323,051	,888,24	8	4	225,475	,595,16	1	221,496	,410,13	8	4	209.772	.034.40	4	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan,	Persen	100	100	70,000,	000	100	9.800.0	100	9.800.0	100	9.800.0	100	9.800.0	100	109.800	.000	100	

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	70,000,000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100,000,000	5	100,000,000		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Dokumen	0			1	9.800.00	1	9.800.00	1	9.800.00	1	9.800.00	1	9.800.00	5	49.000.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Sektoral Daerah	Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	174,075 ,000,00 0	4	143.853 .868.20 0	4	145.120 .391.00 0	4	145.121 .777.00 0	4	145.123 .301.60 0	4	145.124 .978.66 0	4	724.344 .316.46 0		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	354	437	174,000 ,000,00 0	311	143.819 .685.00 0	300	145.094 .731.00 0	285	145.094 .731.00 0	250	145.094 .731.00 0	250	145.094 .731.00 0	250	724.198 .609.00 0		
Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	4	4	75,000, 000	52	34.183. 200	52	25.660. 000	52	27.046. 000	52	28.570. 600	52	30.247. 660	264	145.707 .460		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	6,830,1 18,812	4	5,220,5 24,351	4	4,391,3 26,045	4	5,016,4 23,144	4	5,202,1 91,690	4	5,829,7 91,615	4	25,660, 256,845		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2,200,0 00,000	13	3,090,6 82,656	13	2,552,5 32,223	13	2,974,0 91,938	13	2,918,7 53,600	13	3,288,9 69,298	66	14,825, 029,715		
Penyedia	Jumlah	Paket	12	12	330,000	13	294,161	13	313,043	13	340,040	13	370,740	13	405,666	77	1,723,6		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
an Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				,000		,537		,083		,162		,864		,138		51,784		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	560,000 ,000	13	296,310 ,976	13	268,392 ,542	13	292,339 ,271	13	343,076 ,794	13	376,293 ,608	67	1,576,4 13,191		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	7	1	1,914,1 18,812	13	1,202,0 95,022	13	1,117,4 07,658	13	1,254,1 86,005	13	1,407,0 47,824	13	1,578,1 87,308	72	6,558,9 23,817		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	n																		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	48	936,000 ,000	52	186,560 ,000	52	127,620 ,000	52	141,382 ,000	52	145,520 ,200	52	160,072 ,220	308	761,154 ,420		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	13	13	140,000 ,000	52	150,714 ,160	52	12,330, 539	52	14,383, 768	52	17,052, 408	52	20,603, 043	273	215,083 ,918		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah	Indeks	4	4	15,670,000,000	4	8,946,560,000	4	11,500,000,000	4	4,500,000,000	4	1,500,000,000	4	1,500,000,000	4	27,946,560,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1			5	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,000,000,000		
Pengada	Jumlah	Unit	0	1	3,370,0	0	0	0	0	1	3,000,0	0	0	0	0	1	3,000,0		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
an Alat Besar	Unit Alat Besar yang Disediakan				00,000						00,000						00,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	41	41	4,000,000,000,000	65	1,500,000,000,000	65	1,500,000,000,000	65	1,500,000,000,000	65	1,500,000,000,000	65	1,500,000,000,000	366	7,500,000,000,000		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	1	5,300,000,000,000	0	0	1	10,000,000,000,000	0	0	0	0	0	1	10,000,000,000,000			

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Disediakan																		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0			1	100.000 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000 .000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	0	5	3,000,00,000,000	2	5,346,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5,346,560,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	83,700,000,000	4	39,289,622,872	4	31,488,329,601	4	33,356,221,141	4	35,462,193,359	4	37,710,123,055	4	177,306,490,028		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Laporan	1	1	18,000,000,000	120	8,535,342,590	120	4,321,442,011	120	4,838,029,720	120	5,427,567,725	120	6,087,419,786	601	29,209,801,832		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Daya Air dan Listrik	si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	17	1	700,000 ,000	16	650,000 ,000	16	650,000 ,000	16	650,000 ,000	16	650,000 ,000	16	650,000 ,000	97	3,250,00,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	65,000, 000,000	132	30,104, 280,282	132	26,516, 887,590	132	27,868, 191,421	132	29,384, 625,634	132	30,972, 703,269	661	144,846 ,688,19 6		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Indeks	4	4	29,980,080,553	4	13,061,466,238	4	13,011,271,992	4	6,128,567,544	4	15,149,282,134	4	9,302,726,683	4	56,653,314,591		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	206	208	2,250,045,242	55	1,091,340,565	55	988,888,775	55	1,164,233,758	55	1,429,977,266	55	1,695,875,158	55	6,370,315,522		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinan nya	Unit	3	3	50,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	1,250,000,000	

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	248	660	4,818,399,915	130	1,741,067,037	130	2,193,699,616	130	2,711,064,827	130	3,772,763,233	130	5,218,045,827	130	15,636,640,540		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	38	18,646,368,893	38	9,515,005,806	38	9,135,683,601	38	1,560,268,959	38	9,253,541,635	38	1,695,805,698	38	31,160,305,699		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	53	45	2,605,266,503	13	393,000 ,000	13	393,000 ,000	13	393,000 ,000	13	393,000 ,000	13	393,000 ,000	13	1,965,00,000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
a Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	190	195	110,000 ,000	150	71,052, 830	150	50,000, 000	150	50,000, 000	150	50,000, 000	150	50,000, 000	150	271,052 ,830		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks	4	4	12,726,688,883	4	15,093,753,500	4	15,975,291,500	4	15,639,245,575	4	15,968,181,500	4	16,237,340,675	4	78,913,812,750		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	12,726,688,883	1	15,093,753,500	1	15,975,291,500	1	15,639,245,575	1	15,968,181,500	1	16,237,340,675	1	78,913,812,750		
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	1,077,721,413,664	100	852,291,281,594	100	994,229,454,300	100	1,040,943,171,736	100	1,069,262,503,643	100	1,109,799,371,962	100	5,066,525,783,235		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
at																			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Persentase Paket Pangan yang Terdistribusi	Persen	100	100	1,073,754,003,664	99	835.128.633.093	99	977.085.540.949	99	1.023.796.867.050	99	1.052.102.568.488	99	1.092.624.443.291	99	4.980.738.052.871		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Harga Pangan																			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	4	4	1,071,55,027,971	4	833.430.031.564	4	975.233.829.267	4	1.021.776.734.199	4	1.049.897.172.352	4	1.090.215.257.542	24	4.970.553.024.924		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	4	3	105,900,000	12	215,336,215	12	236,869,837	12	260,556,821	12	286,612,503	12	315,273,753	63	1,314,649,129		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	112			12	1,483,265,314	12	1,614,841,845	12	1,759,576,030	12	1,918,783,633	12	2,093,911,996	60	8,870,378,818		
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	0			50	17.050.000.000	50	17.020.000.000	50	17.010.000.000	75	17.010.000.000	100	17.010.000.000	100	85.100.000.000		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
h Daerah																			
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	0			0	17.000.000.000	1138	17.000.000.000	1136	17.000.000.000	1135	17.000.000.000	1133	17.000.000.000	4542	85.000.000.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0			1	50,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	100,000,000		
Promosi Pencapaian Target Konsums	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti	Orang	12000	525	3,967,410,000	1200	112,648,501	2400	123,913,351	2400	136,304,686	2400	149,935,155	2400	164,928,671	2400	687,730,364		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
i Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Kegiatan Promosi																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi	Laporan	4	4	112,648 ,501	4	123,913 ,351	4	136,304 ,686	4	149,935 ,155	4	164,928 ,671	20	687,730 ,364				

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
si Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	100	97.72	207,660,000	95.45	79,723,235	95.45	83,709,397	95.45	87,894,867	95.45	92,289,610	95.45	96,904,010	95.45	440,521,119		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Kecamatan yang Tahan Pangan	Kecamatan	44	43	207,660,000	42	79,723,235	42	83,709,397	42	87,894,867	42	92,289,610	42	96,904,010	42	440,521,119		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
kewenangan Provinsi																			
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	7	207,660 ,000	1	79,723, 235	1	83,709, 397	1	87,894, 867	1	92,289, 610	1	96,904, 010	6	440,521 ,119		
Program Pengawasan	Persentase Pangan yang	Persen	99,8	99.8	3,641,3 07,311	98	2,438,5 37,474	98.2 5	2,672,6 77,683	98.5	2,926,2 64,565	98.7 5	3,204,7 36,090	99	3,510,5 57,020	98.5	14,752, 772,832		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Keamanan Pangan	Bebas Bahan Berbahaya																		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Bahan Pangan yang Diuji	Sampel	214 89	214 89	3,641,3 07,311	214 89	2,438,5 37,474	214 89	2,672,6 77,683	214 89	2,926,2 64,565	214 89	3,204,7 36,090	214 89	3,510,5 57,020	128 934	14,752, 772,832		
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal	Sertifikat	325			350	42,000, 000	350	210,000, ,000										

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Asal Tumbuhan	tumbuhan																		
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	12	12	571,307 ,311	12	280,876 ,081	12	308,963 ,689	12	339,860 ,058	12	373,846 ,064	12	411,230 ,670	12	1,714,776,562		
Penguatan kelembagaan pengawa	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan	Dokumen	1			1	177,392 ,070	1	189,617 ,739	1	199,098 ,626	1	209,053 ,557	1	219,506 ,234	6	994,668 ,226		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ket.		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
s keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	2,800,00,000	1	1,938,269,323	1	2,132,096,255	1	2,345,305,881	1	2,579,836,469	1	2,837,820,116	6	11,833,328,044		

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Ke t.			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
asal tumbuhan																		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya prasarana peternakan dalam kondisi baik	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Pembangunan, Rehabilitasi,	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya pemenuhan sarana pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	serta Pakan Kewenangan Provinsi	
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	
			Penetapan Lokasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan Perikanan	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian penyakit hewan menular strategis	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	
			Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	
7	Program Pengendalian dan	Meningkatnya area lahan yang terkendali	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penganggulangan Bencana Pertanian				
8	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas kelompok tani	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pangan Provinsi Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
10	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya wilayah tahan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
11	Program Penanganan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pangan yang bebas bahan berbahaya	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan kelembagaan pengawas	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
12	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kawasan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang sesuai dengan dokumen perencanaan ruang laut	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kesehatan Laut Di Wilayah Keweanagan Provinsi	Indeks	69.65	69.69	70	70.5	71	71.5	
2	Persentase Luasan Kawasan Perairan Dan Pesisir Yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial Dalam Kondisi Sedang Dan Baik	Perse	36.59	36.6	36.61	36.62	36.63	36.64	
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor	Perse	0	2	2.5	3	3.5	4	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perikanan								
4	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21920 4	22433 7	22830 7	23235 4	23647 7	24068 1	
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Perse n	26.49	28.99	31.49	33.99	36.49	38.99	
6	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Perse n	25.46	28	30.5	33	35.5	38	
7	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91.31	91.31	91.58	91.86	92.13	92.41	
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence Of Undemourishment (PoU)	Nilai	3.53	3.53	3.21	2.89	2.57	2.4	

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Indeks Kesehatan Laut Di Wilayah Kewenangan Provinsi
2. Persentase Luasan Kawasan Perairan Dan Pesisir Yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial Dalam Kondisi Sedang Dan Baik
3. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
4. Jumlah Produksi Perikanan
5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
6. Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura
7. Skor Pola Pangan Harapan
8. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence Of Undemourishment (POU)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen							
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor							
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen							
4	Persentase pangan segar yang	Persen							

	memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan									
5	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	Persen								
6	Produksi Perikanan Tangkap	Persen								
7	Produksi Perikanan Budi Daya	Persen								
8	Produksi Garam	Persen								
9	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	Persen								
10	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen								
11	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen								

12	Peningkatan Produksi komoditas Pertanian	Persen								
<i>Sumber:</i>	<i>Permendagri</i>	<i>Nomor</i>	<i>19</i>	<i>Tahun</i>	<i>2024</i>					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama

2029. Untuk selanjutnya Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama periode empat tahun, 2025-2029 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung-jawab.

Jakarta, 29 September 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,



Dr. drh. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si
NIP. 7308122006041004

LAMPIRAN



DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR **35** TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN
DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17 Februari 2025**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN

PERTANIAN

PROVINSI DKI JAKARTA,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 35 Tahun 2025
Tanggal : 17 Februari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN
DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029**

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggungjawab : Kepala Dinas
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas
- Sekretaris Tim : Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan
- Anggota Tim : Pelaksana Sub Kelompok Program dan Pelaporan
- Koordinator Sub Sektor Tata Usaha : Sekretaris Dinas
- Anggota :
1. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 wilayah
2. Para Kepala UPT lingkup Dinas KPKP
- Koordinator Sub Sektor Ketahanan Pangan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
- Anggota :
1. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 wilayah
2. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
3. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
- Koordinator Sub Sektor Kelautan : Kepala Bidang Kelautan
- Anggota :
1. Kepala Suku Dinas KPKP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
- Koordinator Sub Sektor Perikanan : Kepala Bidang Perikanan
- Anggota :
1. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 wilayah
2. Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan
4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
- Koordinator Sub Sektor Pertanian : Kepala Bidang Pertanian

Anggota	:	1. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 wilayah 2. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
Koordinator Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Anggota	:	1. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 wilayah 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

II. RINCIAN TUGAS

Penanggungjawab	:	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim	:	Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Tim	:	Mongoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Anggota Tim	:	Membantu Sekretaris dalam mongoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Sub Sektor Ketata Usahaan	:	Mongoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Tata Usaha
Anggota	:	Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Ketata Usahaan
Koordinator Sub Sektor Ketahanan Pangan	:	Mongoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Ketahanan Pangan
Anggota	:	Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Ketahanan Pangan
Koordinator Sub Sektor Kelautan	:	Mongoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Kelautan
Anggota	:	Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Kelautan

- Koordinator Sub Sektor Perikanan : Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Perikanan
- Anggota : Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Perikanan
- Koordinator Sub Sektor Pertanian : Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Pertanian
- Anggota : Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Pertanian
- Koordinator Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan : Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Anggota : Membantu koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis lingkup sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA





**DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian;

7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025 - 2029
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk Menyusun;
 1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA,



HASUDUNGAN A. SIDABALOK

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
 Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 200 Tahun 2025
 Tanggal : 2 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

No	Indikator	Satuan	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kesehatan Laut Di Wilayah Kewenangan Provinsi	Indeks	69,69	70	70,5	71	71,5
2	Persentase Luasan Kawasan Perairan dan Pesisir yang Memiliki Ekosistem Pesisir Esensial dalam Kondisi Sedang dan Baik	Persen	36,6	36,61	36,62	36,63	36,64
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	2	2,5	3	3,5	4
4	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	224337	228307	232354	236477	240681
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	28,99	31,49	33,99	36,49	38,99
6	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Persen	28	30,5	33	35,5	38
7	Persentase Penigkatan Produksi Peternakan	Persen	30	32,5	35	37,5	40
8	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,31	91,58	91,86	92,13	92,41
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence Of Undemourishment (POU)	Nilai	3,53	3,21	2,89	2,57	2,4

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
 PROVINSI DKI JAKARTA,

